



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TANGGA MISKIN AKSES BMT DI KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI



RENO HADIYANTI
07151077

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TANGGA MISKIN AKSES BMT DI KABUPATEN TANAH DATAR”, yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Keluarga tercinta, Papa Erdi Usman, Mama Hayatul Azma, udaku tersayang Hariadi dan Heru Kurniawan, serta uni Riska Destrisia yang selalu memberikan kekuatan, doa, motivasi, semangat dan semua kebutuhanku dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Elfindri, SE, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta mengarahkan penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini;

3. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
4. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec.DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
5. Ibu Sri Maryati, SE, M.Si dan Bapak Zulkifli.N, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Zamzami Munaf, MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat dalam penyelesaian studi penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan pengetahuannya kepada penulis;
8. Seluruh pegawai biro Jurusan Ilmu Ekonomi dan bapak suryadi yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan di kampus ini,
9. Petugas BMT Al-Barokah dan Al-Hikmah serta Bapak dan Ibu nasabah BMT yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempat dalam pengisian kuisisioner untuk pengambilan data;
10. Sahabatku tercinta (Daboribo), Inawaty Diel (semangat ya wati... dikit lagi, kamu pasti bisa kok n November mesti nyusul yach), Maressa Rulanda (ndut, dirimu sungguh syahdu cin..hahaha...kajaan y ndut proposalnyo), Resi Fatmala Sari , Merisa Darman, Rizka Zafitriani, dan Zaida Rahmi (finally girls)
11. To mine, terima kasih atas kebersamaannya, motivasi serta kasih sayang tulus yang telah diberikan, "there is no one luv like u" ☺
12. Buat MAP, Chelsy, Qeqe, ica "tryssa", yelma, melva, vivi, nelvia, wiwid, (welcome to the real world). Adi (UKT lai di,,biar bisa seminar), Aan, Anes,

K' maya, imeng, ayu, tia lesuik, mita, teja, hendra, dajul, mike, ilham
"cocom", farid, jimmy, jefri ardi, mario, mirfan, arifin, rizki "cukiang", rezi
(buruan yah...)

13. Buat anggia, amir" Khan", hajal, awlia, eka, kiki, febi, yudha, dayat"genap",
mira, redha (akhirnya bareng juga yak).

14. Bagi semua teman-teman Ilmu Ekonomi khususnya angkatan 2007 yang tidak
dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua
persahabatan, semangat, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan.
Semoga kebersamaan ini terjalin selamanya;

15. Ida udin angel's, zha (kamu dulu2 se mah pik,,tingga aku ha ☹), Uncu
"sisuak" (buruan cu, jan tunggu ka tunggu se), Ulfa "tek sor" (etek yg sabana
etek2..hahaha), rize (ayo ze,,), kak Fani (Kepala Suku in dakosta
ceria,,hehehe), kakak-kakak terdahulu (k'nana, k'iin, k'mels, k'rini, k'mia n
k' noro), hafiza dan wike "botia" yang sudah pergi dan tak kan kembali...haks

16. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini yang
tidak dapat disebutkan satu per satu disini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Reno Hadiyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Hipotesis	7
1.6. Ruang Lingkup Penelitian	7
1.7. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Industri Kecil.....	10
2.1.2. Lembaga Keuangan Mikro	12
2.1.3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	15
2.1.4. Konsep Kemiskinan.....	17
2.1.4.1. Definisi Kemiskinan	17
2.1.4.2. Teori dan Penyebab Kemiskinan.....	18
2.1.4.3. Indikator Kemiskinan.....	21
2.1.4.4. Kemiskinan dalam Perspektif Islam	23
2.1.5. Konsep BMT	24
2.1.5.1. Pengertian BMT.....	24
2.1.5.2. Prinsip Syariah Produk BMT	26
2.1.5.3. Fungsi Pembiayaan	31
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Data dan Sumber Data	35
3.2. Model Penelitian.....	35
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4. Populasi dan Sampel.....	37
3.5. Definisi Operasional Variabel	38
3.6. Metode Analisis Data	
3.6.1. Analisis Deskriptif	40
3.6.2. Analisis Regresi Logistik	41
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Gambaran Umum BMT	45
4.1.1. Gambaran Umum BMT Al-Barokah	45
4.1.2. Gambaran Umum BMT Al-Hikmah	48
4.2. Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.....	50

	4.3. Profil Responden	53
BAB V	ANALISA DATA DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	
	5.1. Analisa Deskriptif	64
	5.1.1. Profil Usaha dan Akses BMT	64
	5.1.2. Kepatuhan Pengembalian dan Akses BMT	66
	5.1.3. Reborrowing dan Akses BMT	69
	5.2. Analisis Regresi Logistik	71
	5.2.1 Persamaan Regresi Logistik dan Odd Ratio	71
	5.2.2 Hasil Estimasi Regresi Logistik dan Variabel Independen	74
	5.3. Implikasi Kebijakan	77
	5.4. Keterbatasan Studi.....	80
BAB VI	PENUTUP	
	6.1. Kesimpulan	81
	6.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kemiskinan Menurut BPS 2007	22
Tabel 3.1. Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisis Logistik.....	39
Tabel 4.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga BMT Al-Barokah.....	45
Tabel 4.2. Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Barokah.....	46
Tabel 4.3. Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Hikmah	48
Tabel 4.4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga BMT Al-Hikmah	49
Tabel 4.5. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar 2002-2008	50
Tabel 4.6. Jumlah dan Presentase Rumah Tangga Miskin Kecamatan Kabupaten Tanah Datar	51
Tabel 4.7. Distribusi Jenis kelamin Responden	53
Tabel 4.8. Distribusi Tingkat Umur Responden	54
Tabel 4.9. Distribusi Tingkat Pendidikan	55
Tabel 4.10. Distribusi Rumah Tangga Miskin Akses BMT	55
Tabel 4.11. Distribusi Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Tenaga Kerja	56
Tabel 4.12. Distribusi Alasan Responden Akan Tetap dan Tidak Akan Berhubungan Dengan BMT.....	58
Tabel 4.13. Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Sistem Bagi Hasil.....	60
Tabel 4.14. Distribusi Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha Rumah Tangga Miskin	61
Tabel 4.15. Distribusi Profil responden Akses BMT	63
Tabel 5.1. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Profil Usaha	64
Tabel 5.2. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Kepatuhan Pengembalian.....	66
Tabel 5.3. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Reborrowing.....	69
Tabel 5.4. Hasil Uji Korelasi Pearson Antar Variabel Bebas	72
Tabel 5.12. Hasil Estimasi Koefisien, Signifikansi dan Odd Ratio (Exp B) Akses BMT	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Profil Usaha.....	65
Grafik 5.2. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Kepatuhan Pengembalian.....	67
Grafik 5.3. Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Reborrowing.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Lembaga keuangan ini telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Dalam satu dasawarsa pertama (1995-2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp.1,7 triliun, melayani 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil (Pinbuk, 2005)

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Peran lembaga ini untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat akar rumput (fakir, miskin, dan kaum dhu'afa lainnya) yang akses mereka terhadap perbankan sangat kecil, bahkan hampir tak ada sama sekali.

Kemiskinan merupakan musuh utama agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pernyataan-pernyataan di dalam al-Qur'an maupun hadits yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dikatakan di dalam al-Qur'an: "Apakah engkau tahu siapakah pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap fakir miskin." Rasulullah juga kemudian mengatakan bahwa tidak beriman seseorang, di mana ia tidur dengan kekenyangan, tetapi tetangganya

kelaparan yang semakin menegaskan bahwa Islam tidak diturunkan kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, salah satunya dengan memerangi kemiskinan. Ini menjadi sinyal jelas bagaimana Islam memandang fenomena kemiskinan bahwa kemiskinan itu harus dihilangkan karena bisa mengantarkan manusia pada jurang kekafiran.

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi pada sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia adalah hal yang sangat memprihatinkan, karena jumlah penduduk miskin terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen), dari jumlah ini penduduk miskin terkonsentrasi sebesar 63,52 persen di daerah pedesaan. Kriteria miskin tersebut berdasarkan konsumsi masyarakat di bawah Rp.123.000 per bulan. Pada dasarnya masyarakat miskin yang tergolong ekonomi lemah tersebut memiliki kemampuan dan potensi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan melakukan usaha kecil seperti perdagangan, usaha jasa, pertanian, dan industri kecil serta golongan ekonomi lemah umumnya memiliki kesulitan modal dalam mengembangkan usahanya. Berpedoman pada surat An-anisa' ayat 29 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (Al-Qur'an).

Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan permodalannya yakni dengan meminjam sejumlah dana

kepada rentenir. Namun kemudahan memperoleh modal yang diberikan oleh rentenir malah memberatkan mereka akibat suku bunga yang sangat tinggi bahkan lebih tinggi dari keuntungan yang mereka peroleh selama berusaha. Untuk menghindari itu semua, saat ini banyak program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan industri kecil dengan instrumen permodalan sebagai instrumen utama dalam mengembangkan usaha tersebut. Hal ini dilakukan karena dari banyak studi diketahui bahwa masalah permodalan merupakan masalah utama rumah tangga miskin dalam mengembangkan usaha. Pemberian pinjaman modal dapat merangsang produksi yang nantinya akan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan meningkatnya pendapatan, maka kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud. Akibat dari program tersebut adalah banyaknya lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dengan skala mikro dengan sasaran pengusaha mikro dan kecil.

Pengembangan industri kecil makin dirasakan sangat penting, sebab dengan cara menciptakan industri baru diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Melalui sebuah studi yang dilakukan Elfindri (2008) dengan menggunakan sampel ($n=600$) rumah tangga miskin didapatkan kesimpulan mengenai kebutuhan apa yang dirasakan rumah tangga miskin saat ini maka dapat diketahui 74% responden menjawab bahwa kebutuhan modal kerja adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Itu berarti penyediaan akses permodalan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui penciptaan usaha atau industri baru.

Keberadaan BMT memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka dengan cara meningkatkan unit-unit usaha agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan dengan sendirinya akan mampu keluar dari kemiskinan. Sebagai contoh, pada kelompok usaha bersama (POKUSMA) Murni Rasa di Kecamatan Tilang Kamang yang mengolah singkong menjadi keripik singkong. Sebelum adanya BMT petani singkong menjual singkongnya ke pasar tradisional. Rata-rata pendapatannya Rp7600/hari/orang. Namun setelah adanya BMT, penghasilan para petani menjadi Rp. 25.700/hari/orang atau naik rata-rata Rp.18.100/hari/orang (Singgalang, 28 Oktober 2008)

Kabupaten Tanah Datar sampai saat sekarang ini masih belum dapat melepaskan diri dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 yaitu dari 20.500 jiwa menjadi 25.400 jiwa. meskipun pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 800 jiwa menjadi 24.600 dan sebesar 1600 jiwa menjadi 23.800 pada tahun 2008 namun angka tersebut belum memenuhi target penurunan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 20% atau 14.000 rumah tangga miskin.

Namun permasalahan kemiskinan ini telah menemukan suatu solusi dimana saat ini telah berkembang lembaga keuangan mikro BMT dimana dari 14 kecamatan yang ada, sudah terdapat 4 BMT dengan 2 kecamatan yang sudah terdapat BMT memiliki penduduk miskin yang tinggi yaitu Kecamatan

Salimpaung dengan jumlah penduduk 1538 jiwa dan Kecamatan Sungai Tarab sebanyak 1559 jiwa (BPS, 2008)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas BMT tanggal 7 mei 2011 diperoleh informasi bahwa semenjak berdirinya kedua BMT pada tahun 2008 yaitu BMT Al-Barokah dan Al-hikmah yang terdapat di dua kecamatan tersebut jumlah nasabah yang sudah akses telah mencapai 1287 orang dengan jumlah rumah tangga miskin yang akses di kedua BMT adalah sebanyak 377 orang.

Dengan berdirinya suatu lembaga keuangan mikro syariah berupa BMT, diharapkan di Kabupaten Tanah Datar masalah permodalan bagi masyarakat miskin dapat diatasi. Tidak hanya untuk industri lama, penciptaan industri baru pun juga dapat dilakukan melalui pembiayaan yang diberikan oleh BMT terhadap calon pengusaha. Selain itu, dengan adanya lembaga keuangan mikro ini, diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan pendapatannya serta meningkatkan taraf hidup sehingga peran dari pembiayaan yang diberikan BMT dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Dari uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga Miskin Akses BMT di Kabupaten Tanah Datar”**

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan BMT merupakan salah satu solusi dalam hal peningkatan usaha masyarakat. Dimana pemberian modal berupa pembiayaan mikro akan dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat tersebut.

Dengan melihat kondisi di atas dan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, maka fokus dari permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Profil rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi rumah tangga miskin yang memiliki akses ke BMT

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui bagaimana profil rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin yang memiliki akses ke BMT

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai peran dari pembiayaan mikro BMT terhadap kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar.

Secara terapan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam program-program terutama program dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

1.5 Hipotesa Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Diduga profil usaha, mempunyai pengaruh terhadap rumah tangga miskin akses BMT.
2. Diduga tingkat kepatuhan pengembalian, mempunyai pengaruh terhadap rumah tangga miskin akses BMT.
3. Diduga reborrowing, mempunyai pengaruh terhadap rumah tangga miskin akses BMT.

1.6 Pembatasan Penelitian / Ruang Lingkup Penelitian

Karena begitu kompleksnya permasalahan/ruang lingkup pembahasan maka untuk mempermudah dan menjadikan penulisan lebih terarah maka perlu adanya pembatasan-pembatasan, yaitu :

1. Lokasi penelitian yang terpilih sudah terdapat BMT yang memberikan pembiayaan mikro yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi yang terdiri dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Salimpaung
2. Penelitian ini tertuju pada rumah tangga miskin yang akses dengan BMT

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bagian ini mengemukakan beberapa konsep teori atau landasan teoritis, dan studi-studi sebelumnya yang pernah dilakukan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan data dan sumber data, variabel dan definisi operasional, pengukuran variabel, rancangan penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum dan Profil Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum daerah penelitian dan Profil responden

BAB V : Penemuan Empiris dan Implikasi Kebijakan

Pada bagian ini, akan dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin akses BMT. Faktor tersebut terdiri dari profil usaha, kepatuhan pengembalian dan reborrowing

BAB VI : Kesimpulan dan Saran.

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atau masukan penelitian di masa yang akan datang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari sub bab yaitu kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan dan kajian dalam studi.

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Industri Kecil

Menurut UU No.9 Tahun 1995 tentang industri kecil, industri kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang di atur dalam UU ini kriteria yang ditetapkan dalam UU ini adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 1 milyar
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
5. Bentuk usaha adalah orang perorangan

Yang termasuk usaha kecil adalah :

- a. Pedagang keliling
- b. Pedagang barang-barang konsumsi
- c. Pedagang sayuran dan buah-buahan

- d. Pedagang kebutuhan rumah tangga
- e. Warung makan
- f. pertanian

Dalam memenuhi kebutuhan modal masyarakat dan usaha meningkatkan pendapatan masyarakat maka salah satunya perlu dilakukan penciptaan dan pengembangan industri kerakyatan. Baswir (1999) menyatakan bahwa ciri-ciri industri rakyat/kecil antara lain :

1. Kegiatannya yang cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha
2. Struktur organisasi yang sederhana
3. Jumlah tenaga kerja yang terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
4. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
5. Sistem manajemen dan akuntansi yang kurang baik
6. Skala ekonominya terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
7. Pemasaran yang berskala terbatas
8. Margin keuntungan yang sangat tipis

Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), 1999, industri kecil identik dengan industri rumah tangga.

Menurut Bantacut Dalam Haeruman (2001), industri kecil adalah badan usaha yang menjalankan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil.

Susilobroto (2001) dalam Safitri (2009) menyatakan potensi yang dimiliki oleh industri kecil cukup besar. Usaha kecil sudah mampu memainkan peran yang strategis dalam perekonomian. Sumbangannya dalam berbagai sektor pembangunan tidak perlu disangsikan lagi, seperti penyerapan tenaga kerja dan perluasan lapangan usaha. Disamping itu usaha kecil mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh industri besar seperti biaya organisasi yang rendah, kebebasan bergerak serta rendahnya biaya investasi.

Dari hal tersebut di atas sangat diperlukan pemberian pembiayaan bagi usaha kecil yang berguna dalam peningkatan pendapatannya. Pembiayaan yang diberikan sebagai modal usaha bukan berasal dari rentenir yang sekarang ini masih dijumpai di daerah pedesaan. Bukan membantu pengusaha kecil melainkan menghambat pengembangan usaha mereka akibat bunga yang tinggi. Pembiayaan yang berasal dari KJKS BMT diharapkan mendorong pengusaha kecil untuk dapat meningkatkan produksinya sehingga meningkatkan pendapatan dan masalah sosial kemiskinan dapat diatasi.

2.1.2 Lembaga Keuangan Mikro

Micro Credit Summit (1997), keuangan mikro adalah program pinjaman uang terhadap keluarga miskin untuk digunakan sebagai usaha yang memberikan hasil atau income dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB) dalam Wirjo (2005), lembaga keuangan mikro (microfinance) adalah

lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low income households and their microenterprise*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, dan lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah dan sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Indonesia (2007) dibagi menurut dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank dan LKM non bank. Yang berwujud bank seperti BRI unit desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattamwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union.

Karakteristik lembaga keuangan mikro menurut Adam dan Fitchett (1992) dalam Arsyad (2006) yaitu :

1. Lembaga keuangan yang dinamis, inovatif, dan penyusunan yang fleksibel yang disesuaikan lingkungan ekonomi dan sosial daerah
2. Transaksi yang kecil dan jangka pendek yang berdasarkan pada hubungan personal atau lembaga yang dekat dengan para pelanggannya dan biasanya berada dekat dengan tempat tinggal klien, berbelanja dan bekerja

3. Memfasilitasi klien untuk masuk lembaga keuangan mikro dengan menggunakan prosedur yang sederhana dan pinjaman didistribusikan dengan cepat
4. Suku bunga rendah dilakukan oleh lembaga keuangan mikro yang berdasarkan orientasi pasar yang diharapkan untuk menutupi keduanya yaitu biaya kegiatan dan keuangan, berdasarkan asumsi bahwa selayaknya membayar untuk akses dan waktu luang

Tiga elemen penting yang terdapat pada definisi keuangan mikro menurut Khrisnamurti (2005) dalam Safitri (2009) adalah :

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

2. Melayani rakyat miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel

2.1.3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Andi (2008) menyatakan bahwa teori keuangan mikro dalam islam mencakup program bantuan (*charity*) kepada mereka yang membutuhkan sehingga keuangan mikro islam adalah program bantuan sosial kepada orang miskin dilanjutkan dengan memberikan pinjaman modal usaha dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki visi untuk menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan masyarakat produktif yang bertaqwa melalui pelayanan jasa keuangan mikro berbasis syariah pada rumah tangga miskin pedesaan.

Menurut Andi (2008) lembaga keuangan mikro islam mempunyai lima tahapan dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan kaidah islam, secara terperinci program tersebut adalah :

1. *Charity Program*, program bantuan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa pamrih dan murni sebagai program sosial, karena mereka sangat membutuhkan. Dengan menggunakan akad sedekah dan hibah di atur dalam fiqh, para pelaku lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat menghimpun dana zakat, sedekah dan infaq yang dapat langsung disalurkan kepada mereka
2. Program pinjaman, program ini menggunakan akad qardh yaitu pemberian pinjaman tanpa adanya tambahan apalagi jaminan dan memberikan keleluasaan kepada orang miskin untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan

Dengan akad ini LKMS dapat dengan langsung membantu kaum miskin dengan menggunakan proses pencairan dana pinjaman tersebut. Dan diyakini bahwa orang miskin tidak akan mengajukan kredit peminjaman kecuali kepada pihak yang telah mereka kenal dan mereka merasa nyaman, karena sebelumnya LKMS telah memberikan bantuan langsung kepada mereka.

3. *Financing Program* atau pembiayaan, program ini adalah tahapan lanjutan setelah memberikan bantuan atau pinjaman qardh, LKMS dalam membantu proses pelunasan pinjaman tersebut. program ini mendidik kaum miskin untuk berusaha hidup mandiri dengan melakukan kegiatan dan usaha yang dapat menghasilkan income dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan LKMS. Akad fiqh yang dapat digunakan seperti mudharabah, musyarakah. Diharapkan dengan program tersebut kaum miskin meningkatkan taraf kehidupannya dan mendapatkan penghasilan tambahan dan dapat melunasi hutang sekaligus memiliki dan mempunyai dana lebih yang dapat ditabung.
4. *Saving Program* dan *Investment*, pada program ini LKMS memberikan edukasi kepada kaum miskin agar tidak boros dan konsumtif ketika mendapatkan dana lebih, hasil jerih upaya yang telah dihasilkan akan tetap bersifat ekonomis
5. *Micro insurance*, program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat saling menanggung (*risk sharing*), sebagai wujud dan bentuk lain dari

kepedulian kepada orang miskin lain. Pada program ini LKMS bisa menjadi penampung dana mikro asuransi dan mengelolanya serta memudahkan proses tanggungan tanpa administrasi yang berbelit-belit dalam memberikan manfaat atau tanggungan bagi anggota yang tertimpa musibah. Dengan demikian terwujudlah perasaan saling berbagi dalam suka dan duka, diantara kaum miskin dan dhuafa.

Fungsi dan peranan lembaga keuangan mikro syariah menurut Andi (2008)

1. Mengidektifikasi, memobilisasi, meongorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan daerah kerjanya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak kaya dan miskin untuk dana-dana sosial dan pengembangan usaha produktif

2.1.4 Konsep Kemiskinan

2.1.4.1 Definisi Kemiskinan

Memerangi kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik (Tjiptoherijanto, 1997: 76) dalam Adha (2009). Menurut Lewis, A. (Suparlan, 1995), memandang kemiskinan dan ciri-cirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan

struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan (Suparlan, 1995). Menurut Kadir, (1993) dalam Adha (2009) kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Hal ini disebabkan terbatasnya modal yang mereka miliki dan rendahnya pendapatan mereka.

Menurut World Health Organization, (world Bank,1995) dalam Adha (2009), kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat timbul karena pendapatan yang rendah, namun ada negara yang pendapatan per kapitanya cukup tinggi akan tetapi tingkat kemiskinannya juga tinggi. Hal ini dimungkinkan karena distribusi pendapatannya kurang merata.

2.1.4.2 Teori dan Penyebab Kemiskinan

Sumodiningrat (1999), kesenjangan dan kemiskinan dilihat dari segi penyebabnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Kesenjangan dan kemiskinan natural yaitu kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia,

perbedaan tingkat kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal dan lain-lain.

2. Kesenjangan dan kemiskinan cultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat budaya seperti etika kerja, pola hidup dan sebagainya.
3. Kesenjangan dan kemiskinan structural yang disebabkan oleh factor-faktor buatan manusia, misalnya kebijakan pemerintah pada perekonomian yang bersifat diskriminatif, kolusif dan koruptif, distribusi pendapatan yang tidak merata hingga tatanan ekonomi dunia yang timpang dan lain-lain.

Namun, ada juga ahli ekonomi yang mengemukakan bahwa penyebab kemiskinan hanya ada dua macam., yaitu:

1. Kemiskinan akibat struktur yang disebut sebagai kemiskinan struktural yang didefinisikan sebagai “kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur social masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka.” Contohnya adalah kasus busung lapar di Nusa Tenggara Barat, di mana daerah tersebut sebetulnya merupakan lumbung pangan dan senantiasa mengalami surplus pangan.
2. Kemiskinan cultural. Kemiskinan ini diakibatkan oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang ikut berperan dalam membentuk serta melanggengkan kemiskinan. Budaya ini, oleh Carl Lewis diteorisasikan dengan “budaya kemiskinan” (*Cultur of Poverty*). Sifat malas, tidak rajin dan tekun, serta bersikap pasrah dengan keadaan merupakan contoh

perilaku (behaviour) yang tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga memeliharanya.

Ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin (Chambers, 1996) yaitu:

1. Kemiskinan (Proverty)
2. Fisik yang lemah (physical weakness)
3. Kerentanan (vulnerability)
4. Keterisolasiaan (isolation)
5. Ketidakberdayaan (powerlessness)

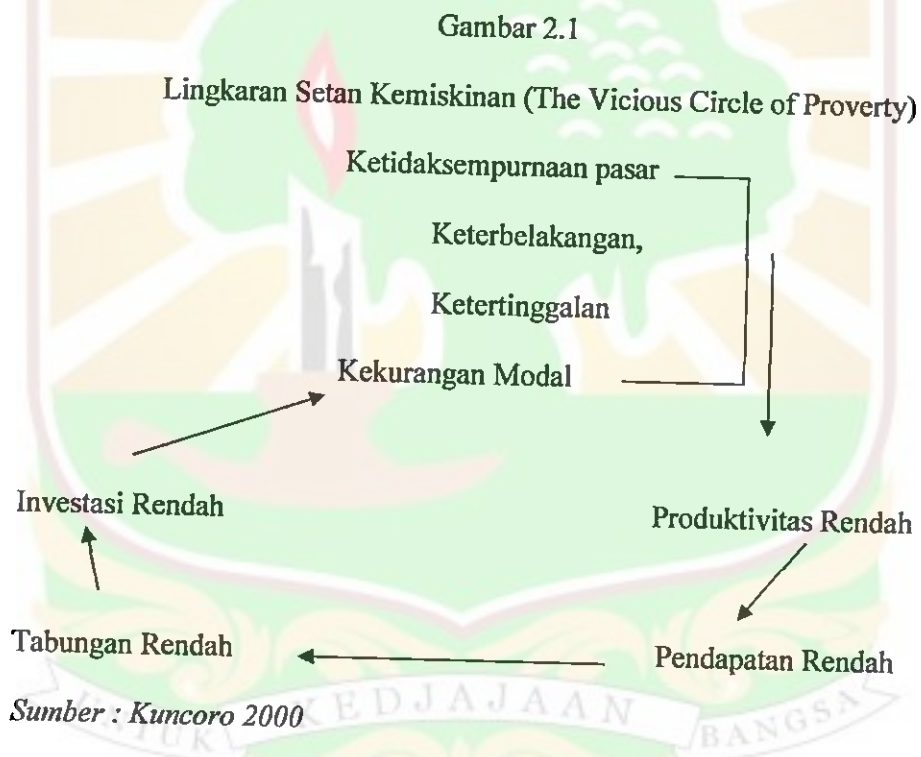
Kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada masyarakat miskin di Negara berkembang.

Di sisi lain, kemiskinan juga menimbulkan masalah dalam skala besar kenegaraan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, beban pemerintah menjadi semakin bertambah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkomitmen bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, yang hingga enam puluh tahun lebih merdeka dari penjajah, belum bisa merealisasikannya.

Kuncoro (2000) yang mengutip Sharp, penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal
- Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle poverty).



2.1.4.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) indikator utama kemiskinan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kemiskinan Menurut BPS 2007

No	Indikator	Variabel
1	Luas Lantai	Luas < 8 m ²
2	Jenis Lantai	Tanah/ semen
3	Jenis Dinding	Bambu/ tembok
4	Sanitasi /MCK	Bersama/sendiri
5	Sumber Air Minum	Sumur / lainnya
6	Penerangan	Bukan listrik / listrik
7	Jenis Bahan Bakar	Kayu/ minyak Tanah & gas
8	Makan daging/minggu	Tidak pernah/ pernah
9	Berapa kali makan/ hari	Satu, dua atau tiga
10	Berapa kali pakaian dibeli/ tahun	Tidak pernah, atau satu atau dua kali
11	Berobat ke sarana kesehatan	Ya, atau tidak
12	Lapangan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	Banyak Pilihan
13	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	SD, SMP, atau SMA
14	Nilai kekayaan > Rp.500.000	Tabungan, Emas, Tv, Ternak, Sepeda motor

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang 2007

Dari Tabel Di atas dapat diketahui indikator kemiskinan menurut BPS dalam 14 kategori. Untuk kategori lantai yang tergolong miskin adalah, luas lantai yang kurang dari 8 M² dengan jenis lantai tanah. Sedangkan untuk dinding adalah yang terbuat dari bambu. Kemudian dalam hal sanitasi/MCK, yang tergolong miskin adalah pemakaian sarana secara bersama, dengan sumber airnya berasal dari sumur. Dalam hal penerangan, yang tergolong kategori miskin adalah, yang bukan menggunakan listrik, sedangkan bahan bakar yang digunakan adalah dari kayu atau minyak tanah. Dalam hal makanan, yang tergolong kategori miskin adalah dengan intensitas makanan satu atau dua kali sehari, dengan makanan yang belum memenuhi standar gizi untuk kesehatan. Dalam hal berobat ke sarana

kesehatan, yang tergolong dalam kategori miskin adalah yang tidak pernah berobat ke sarana kesehatan, atau walaupun ada berobat ke Puskesmas dengan intensitas yang sangat jarang sekali. Dalam hal pekerjaan kepala rumah tangga terdapat banyak pilihan, artinya tidak tetap pada satu bidang, tergantung situasi atau kondisi. Sedangkan dalam hal nilai kekayaan, biasanya kurang dari Rp.500.000 , karena tidak terdapat barang yang berharga atau mempunyai nilai jual tinggi.

2.1.4.4 Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Sejak kelahirannya, agama Islam adalah musuh utama kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pernyataan-pernyataan di dalam al-Qur'an maupun hadits yang menganjurkan kepada umat Islam untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dikatakan di dalam al-Qur'an: "Apakah engkau tahu siapakah pendusta agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan tidak peduli terhadap fakir miskin."

Rasulullah juga kemudian mengatakan bahwa tidak beriman seseorang, di mana ia tidur dengan kekenyangan, tetapi tetangganya kelaparan yang semakin menegaskan bahwa Islam tidak diturunkan kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam, salah satunya dengan memerangi kemiskinan. Sedangkan Imam Ali ra., menyebut kemiskinan sebagai kematian atau musibah terbesar.

Bagi orang-orang yang tidak mau peduli dengan kemiskinan, Allah swt. mengeluarkan perintah tegas untuk menghukum mereka:

“Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan (seperti) itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin.”

Bahkan, masih banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang semuanya bermuara pada satu kesimpulan bahwa Islam diturunkan untuk melenyapkan kemiskinan di atas muka bumi, sebagaimana pernah terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab dan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diturunkannya al-Qur’an dimuka bumi adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu-belenggu kemiskinan menuju kemerdekaan dan kemandirian secara ekonomis.

2.1.5 Konsep BMT

2.1.5.1 Pengertian BMT

Pengertian BMT (PINBUK, 2009) adalah Baitul Maal wat Tamwil yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah.

Dari pengertian BMT diatas diatas terdapat lima unsur yaitu :

1. Sistem Intermediasi keuangan

Intermediasi atau disebut perantara, dimana dalam konteks ini BMT adalah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) orang yang defisit dana

(menumbuhkan dana) dan sebagai perantara maka BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana, mengadministrasikan dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

2. Tingkat Mikro

Tingkat mikro memiliki pengertian bahwa BMT harus beroperasi pada tingkat mikro ini artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan BMT adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan kecil yang tidak bisa dijangkau oleh system perbankan, maka dalam konteks ini BMT harus mengutamakan kelompok usaha yang layak tapi tidak bankable maka ketika BMT beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlunya proses pendampingan yang dilakukan oleh BMT untuk anggotanya, jadi kalau dilihat dari sistem operasinya maka BMT tidak dapat disamakan dengan system bank tetapi lebih menyerupai ventura dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh BMT.

3. Baitul Tamwil

Baitut Tamwil (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

4. Baitul Maal

Baitul Maal (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menggalang Titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi sosial jadi BMT memerankan dirinya untuk membantu kesulitan anggotanya yang mempunyai masalah sosial dan harus mampu meningkatkan kualitas anggotanya dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana ZIS dan lainnya.

5. Prinsip Syari'ah

BMT dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syari'ah maka dalam konteks ini menjadi suatu kewajiban bagi para pengelola BMT mengetahui dan memahami ekonomi syari'ah dan fiqih muamalah

2.1.5.2 Prinsip Syariah Produk BMT

Beberapa konsep dan prinsip syariah yang diterapkan pada bidang ekonomi khususnya lembaga keuangan tentunya harus mengacu dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam muamalah. Sehingga penerapan muamalah memiliki sifat eksternal, dimana dengan sifat ini dimungkinkan adanya sistem yang dinamakan "*thawabit wa mutagoyyirat*" (prinsip dan variable) dalam islam. Prinsip dan konsep syariah ini menjadi landasan hukum (syari'ah) dalam proses operasional pengelolaan lembaga keuangan termasuk didalamnya BMT (baitul maal wat tamwil).

Penggunaan prinsip dalam konsep syariah ini dilakukan untuk memudahkan pengolongan yang nantinya akan memudahkan dalam proses penghitungan karena penggolongan ini dilakukan berdasarkan proses pengambilan keuntungan/ biaya yang timbul akibat dilaksanakan akad tersebut, yang dimaksud dengan prinsip disini adalah konsep atau syarat-syarat yang mendasari pemberlakuan suatu akad, berdasarkan kesamaan konsep dan syarat ini maka dilakukan pengolongan contoh prinsip titipan, prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dll.

Dalam praktek operasional BMT seluruh Prinsip dan akad dirumuskan dan dikembangkan dalam sebuah produk yang secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok besar yaitu simpanan dan pembiayaan

A. Jenis-jenis akad dalam simpanan BMT adalah sebagai berikut :

1. akad titipan (al wadi'ah)

Dalam simpanan ini *Al Wadi'ah* diartikan sebagai titipan (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga kepada pihak yang menyimpan (yang dititipi) yang harus dijaga dan dikembalikan ketika pihak yang memiliki barang menghendaki.

2. Al Mudharabah

Al Mudharabah adalah suatu akad kerjasama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yaitu pihak penyedia modal/dana (*shahib al mal*) dan pihak yang mengelola usaha (*mudhorib*) dimana keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

B. Jenis-jenis akad Pembiayaan BMT

1. Prinsip kerjasama

a. Al Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu perusahaan atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.

b. Mudharabah

Mudarabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan rasio laba yang telah ditetapkan dan disepakati secara advance, manakala rugi maka shahibul mal akan kehilangan sebagian dari kerjas keras dan managerial skill selama proyek.

c. Muzara'ah

Memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.

d. Musyqaqah

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'at dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

pemeliharaan. Sebagai imbalan maka si penggarap berhak mendapat atas ratio tertentu dari hasil panen.

2. Prinsip Jual beli

a. Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana BMT dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota tersebut. Harga jual kepada anggota adalah sebesar harga beli (pokok) barang ditambah margin keuntungan yang disepakati sebelumnya antara BMT /BMT dengan anggotanya.

b. Bai as Salam

Jual beli as Salam atau disebut juga dengan salaf merupakan kebalikan dari jual beli Bai' Bitsaman 'Ajl. Dalam jual beli Assalam pembayaran dilakukan secara tunai pada waktu perjanjian (advance payment), tetapi penyerahan barang ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati

c. Istishna'

Al Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mstashni') dan penjual (pembuat, shani').

3. Prinsip sewa (ijarah)

Ijarah adalah transaksi pertukaran hak guna atau manfaat atas barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah/ sewa yang telah disepakati bersama tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

4. Prinsip Pengambilan fee

a. Kafalah

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafill) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashill)

b. Wakalah

Adalah pelipahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan

c. Hawalah

Adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang wajib mananggung (membayar)-nya.

d. Ar Rhan

Adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas harta yang diterimanya

5. Prinsip kebajikan

Qardhul Hasan adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak mampu atau dalam kesusahan yang dinilai produktif

dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang diterimanya.

2.1.5.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang berlandaskan syariah memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Fungsi pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur yaitu dengan adanya pembiayaan dari BMT akan terpenuhi kebutuhan modal usaha
2. Fungsi pembiayaan bila ditinjau dari kepentingan masyarakat masyarakat luas yaitu pembiayaan dari BMT dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Selain itu, dengan menyimpan dana di BMT maka masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah karena adanya zakat usaha dan profesi yang disalurkan ke BMT
4. Membina ukhuwah melalui kegiatan ekonomi

2.2 Penelitian Terdahulu

Ahmed (2002) dalam jurnalnya yang berjudul “Financing Microenterprise : An Analytical Study of Islamic Microfinance Institution”. Menyatakan bahwa LKM islam dapat diintegrasikan kedalam program keuangan mikro untuk

membiyai usaha kecil dan mengurangi tingkat kemiskinan secara efektif. Lembaga keuangan mikro Islam ini memiliki beberapa karakteristik yang melekat yang menyediakan pembiayaan mikro secara efektif dengan menghindari beberapa masalah yang dihadapi LKM konvensional

Khandker (2003) mempelajari dampak keuangan mikro yang tersedia di desa-desa di Bangladesh menemukan akses rumah tangga miskin ke keuangan mikro menghasilkan keuntungan yang signifikan terhadap pendapatan dan aset total. Dia juga menemukan bahwa pinjaman yang diberikan kepada perempuan lebih menciptakan keuntungan yang lebih besar untuk rumah tangga karena meningkatkan aset yang bisa membangkitkan aktivitas untuk pendapatan dimasa depan daripada pinjaman yang diberikan kepada laki-laki

Studi mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (2006) di Propinsi Jawa Timur. Program yang bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara pada bulan Oktober dan November 2006. Responden yang memanfaatkan dana PPK tergabung dalam Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden $n = 269$ dan simpan pinjam perempuan (SPP) dengan jumlah responden $n = 274$ yang tersebar di 27 Kabupaten di Jawa Timur. Pengolahan data dilakukan dengan Ordinary Linear Square (OLS) dimana yang menjadi variabel terikatnya adalah kemiskinan dan variabel bebasnya pinjaman baik UEP atau SPP yang sudah di analisis.

Hasil yang diperoleh adalah pinjaman yang diterima kelompok UEP, dapat menurunkan kemiskinan Kelompok UEP pada derajat signifikansi 90% (karena $t_{hitung} > t_{tabel}$). 1 Pinjaman yang diterima kelompok dapat menurunkan kemiskinan sebesar 0,12 unit pada derajat kesalahan 0,5% ($t_{hitung} > t_{tabel}$).

Arun, Imai dan Sinha (2006) menggunakan data yang dikumpulkan untuk perkembangan industri kecil di Bank India. Teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan kesejahteraan sebuah rumah tangga yang memiliki akses pada Lembaga Keuangan Mikro dengan rumah tangga yang tidak memiliki akses ke LKM. Mereka menemukan bahwa akses ke LKM memiliki dampak yang signifikan dalam hal kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan yang mereka gunakan adalah pendapatan, asset rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Nawas (2010) melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh keuangan mikro terhadap kemiskinan di Bangladesh. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemberian modal terbukti dapat membangkitkan kegiatan ekonomi bagi penduduk miskin di bangladesh, sehingga dianggap sangat sesuai untuk memecahkan penyediaan modal bagi penciptaan kegiatan produktif untuk penduduk miskin. Temuan yang menggembarakan bahwa rumah tangga yang telah akses lebih dari satu tahun memiliki usaha yang mengalami peningkatan dari rumah tangga yang baru saja bergabung. Selanjutnya Nawas menyebutkan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari peminjam keuangan mikro terdapat peningkatan dalam berbagai indikator ekonomi. Temuan ini pada gilirannya menunjukkan bahwa perbaikan situasi ekonomi peminjam yang dihasilkan dari keuangan mikro telah menyebabkan perbaikan dalam berbagai indikator kemiskinan, sehingga

memberikan bukti kuat tentang dampak positif dari keuangan mikro terhadap kemiskinan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang di berikan. Data primer meliputi identitas responden dan data mengenai pembiayaan mikro dari BMT

Jenis data kedua yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dipublikasikan dan telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan diperoleh dari publikasi BPS propinsi Sumatera Barat dan Publikasi Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

3.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian deskriptif, yakni suatu model dalam meneliti karakteristik kelompok manusia, obyek, kondisi, maupun peristiwa dimasa yang akan datang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses yang sedang berlangsung serta berpengaruh dari suatu fenomena (Syamsiar, 2007)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut (Lofland, dalam Sitorus 1998) :

3.3.1 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan, diantaranya :

1. *Getting in*, yaitu proses memasuki lokasi penelitian. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan bersosialisasi secara baik dengan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan penduduk/informan
2. *Getting along*, yaitu proses perolehan informasi dari penduduk/informan di lokasi penelitian
3. *Logging the data*, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui :
 - a. Wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
 - b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan
 - c. Daftar pertanyaan/kuisisioner, terdiri dari beberapa pertanyaan yang disusun sedemikian rupa untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan BMT dalam mengurangi kemiskinan.

Penulis akan menjelaskan tentang kegunaan dan cara pengisian kuisioner kepada responden terlebih dahulu dan kuisioner yang digunakan bersifat tertutup

3.3.2 Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan bacaan lainnya

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan seluruh atau semua individu yang sesuai dengan karakteristik penelitian yang dapat memberikan informasi atau data untuk diteliti. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana dinamika usaha rumah tangga miskin dengan adanya pembiayaan mikro dari BMT. Jadi yang menjadi populasi adalah setiap rumah tangga miskin yang akses BMT di Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Salimpaung

2. Sampel

Data dikumpulkan dengan cara mengambil sampel, sampel tersebut diambil dari populasi rumah tangga miskin yang memiliki akses dengan dua BMT di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Tarab dan Kecamatan Salimpaung

Adapun metode penarikan sampel digunakan rumus Slovin dalam Husein (1996) dalam Arnas (2009) yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Nd^2} \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

n = total sampel

N = total populasi

d = tingkat error (10%)

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa nasabah merupakan rumah tangga miskin yang memperoleh pembiayaan mikro dari kedua BMT berjumlah 377 orang. Dengan menggunakan nilai kritis 10% maka jumlah sampel yang didapatkan sebagai berikut :

$$n = \frac{377}{1+377 \cdot (0,1)^2} \dots\dots\dots(3.2)$$

n = 79 responden

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel yang terkait atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akses BMT. Sedangkan variabel independen merupakan variabel-variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel lain. Variabel independennya terdiri dari kepatuhan pengembalian pembiayaan, profil usaha nasabah dan Reborrowing/peminjaman kembali yang dilakukan nasabah. Devinisi variabel dan pengukurannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Variabel akses BMT

Dengan melihat lamanya rumah tangga miskin akses BMT. Dalam penelitian ini, digunakan indikator kualitatif yaitu jika Y = 1 berarti rumah tangga miskin yang akses BMT lebih dari 1 tahun (> 1 tahun) dan jika Y = 0 berarti

rumah tangga miskin yang akses BMT kurang dari 1 tahun (≤ 1 tahun). Hal ini dikarenakan, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Nawas (2010) diperoleh hasil bahwa rumah tangga yang telah akses lebih dari 1 tahun memiliki usaha yang mengalami peningkatan dibandingkan rumah tangga yang baru saja bergabung.

2. Variabel profil usaha

Karena mayoritas penduduk di dua kecamatan bekerja di bidang perdagangan, maka profil usaha memperlihatkan jenis usaha dari rumah tangga miskin akses BMT dimana dalam penelitian ini jika mereka berusaha di bidang perdagangan dilambangkan dengan 1, tetapi jika usaha mereka di non-perdagangan dilambangkan dengan skala 0.

3. Variabel kepatuhan pengembalian

Kepatuhan pengembalian adalah kemampuan seseorang untuk membayar kembali hutangnya (www.perencanaankeuangan.com), dimana semakin patuh rumah tangga miskin dalam mengembalikan pembiayaan maka semakin tinggi aksesnya terhadap BMT. Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan pengembalian diukur dengan kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman secara lancar atau kurang lancar. Jika kepatuhan pengembalian dilakukan secara lancar dilambangkan dengan skala 1, tetapi jika kurang lancar maka dilambangkan dengan skala 0

4. Variabel peminjaman kembali (*Reborrowing*)

Variabel peminjaman kembali diukur dari kegiatan peminjaman yang dilakukan oleh rumah tangga miskin yang akses BMT setelah menyelesaikan

pembiayaan sebelumnya. Dalam penelitian ini jika rumah tangga miskin melakukan peminjaman kembali dilambangkan dengan skala 1, tapi jika tidak melakukan peminjaman kembali dilambangkan dengan skala 0.

Tabel 3.1
Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisis Logistik

Variable	Label
Variable Dependen <ul style="list-style-type: none"> • Akses BMT 	1 = > 1 Tahun 0 = ≤ 1 tahun
Variable Independent <ul style="list-style-type: none"> • Profil Usaha (PU) • Kepatuhan Pengembalian (KP) • Reborrowing (RBW) 	1 = Perdagangan 0 = Non Perdagangan 1 = Lancar 0 = Kurang Lancar 1 = Ya 0 = Lainnya

3.5 Metode Analisis data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif dengan metode tabulasi silang adalah metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Dalam analisis tabulasi silang digunakan distribusi persentase pada sel-sel dalam tabel sebagai dasar untuk menyimpulkan hubungan antara variabel yang diteliti. Cara perhitungan persentase amat menentukan keakuratan interpretasi. Jadi dalam perhitungan ini, persentase responden untuk setiap kelompok dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk melihat hubungan antara variabel.

3.5.2 Analisis Regresi Logistik

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi Logistik Biner (Binary Logistic Regression), karena variabel dependennya hanya memiliki 2 kemungkinan [dummy variable (0 dan 1)]. Dalam penelitian ini, maka $Y = 1$ menyatakan kejadian akses BMT lebih dari 1 tahun, sedangkan $Y = 0$ menyatakan kejadian dimana akses BMT ≤ 1 tahun.

Alasan memilih model tersebut adalah dikarenakan dalam model regresi ini mengandung variabel dependen yang bersifat kualitatif sehingga harus lebih dahulu perlu diformulasikan bentuk model regresi yang akan ditaksir. Disamping itu, model logit mampu meminimalkan atau menghilangkan situasi *heteroscedasticity* dalam *error terms* dan tidak realistisnya nilai – nilai yang diperkirakan akan diperoleh Y_i sebagai hasil perhitungan regresi. Karena Y adalah kualitatif maka dalam penelitian ini tidak digunakan model Regresi Linier Sederhana, tetapi digunakan model Logit atau regresi logistik.

Menurut Hosmer dan Lemeshow (2000) menjelaskan peluang regresi logistik dengan p faktor (peubah penjelas) adalah :

$$\pi(x) = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}$$

Dimana $\pi(x)$ adalah peluang terjadinya $Y = 1$ atau dalam penelitian ini adalah probability akses BMT > 1 tahun. Dengan melakukan transformasi logit dari $\pi(x)$, diperoleh persamaan yang lebih sederhana, yaitu:

$$g(x) = \ln \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)}$$

$$g(x) = \ln \pi(x) - \ln(1 - \pi(x))$$

$$g(x) = \left\{ \ln \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\} - \ln \left\{ 1 - \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\}$$

$$g(x) = \ln \{ \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \} - \ln \{ 1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p) \} -$$

$$\ln \left\{ \frac{1}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)} \right\}$$

$$g(x) = \ln \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p - \ln 1$$

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p - 0$$

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

Persamaan tersebut merupakan fungsi linier dalam parameter-parameternya. Persamaan ini dijadikan model pengujian sebagai berikut:

$$G(X) = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

$$G(X) = \ln \left\{ \frac{P}{1-P} \right\} \quad \ln \left\{ \frac{P}{1-P} \right\} \text{ adalah Odds Ratio}$$

Maka dalam penelitian ini akan dipergunakan model yang dituliskan sebagai berikut:

$$\ln \left\{ \frac{P}{(1-P)} \right\} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + E$$

$$\ln \left\{ \frac{P}{(1-P)} \right\} = \beta_0 + \beta_1 KP + \beta_2 PU + \beta_3 RBW + E$$

Keterangan:

P = peluang rumah tangga miskin yang akses BMT lebih dari 1 tahun dipengaruhi oleh variabel independen

$1 - p$ = peluang rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X_1, X_2, X_3 = variabel bebas, dimana PU = profil usaha, KP = kepatuhan pengembalian RBW = reborrowing.

Sebelum melakukan proses *multiple logistic regression*, harus dilakukan terlebih dahulu uji korelasi terhadap variabel independennya. Uji tersebut dilakukan dengan uji χ^2 atau uji korelasi terhadap korelasi Pearson. Bila diantara variabel dependen ada yang mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat, maka salah satu dari variabel independennya harus dikeluarkan.

Setelah persamaan model terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan koefisien-koefisien yang didapat. Dari model yang terbentuk diperoleh hasil yang penting untuk menginterpretasikan model tersebut, yang biasa disebut Odd ratio, yang merupakan perbandingan resiko antara 2 kelompok individu dalam karakter yang berbeda.

Odd ratio didefinisikan sebagai $\{p/(1-p)\}$ dimana p menyatakan probabilitas sukses (terjadinya peristiwa $Y = 1$), sedangkan $(1 - p)$ menyatakan probabilitas gagal (terjadinya peristiwa $Y = 0$).

Dengan demikian Odd ratio (perbandingan nilai odd atau resiko antara dua kelompok individu) yang dilambangkan Ψ dituliskan sebagai berikut:

$$\Psi = \left[\frac{p^{(XA)} / 1 - p^{(XA)}}{p^{(XB)} / 1 - p^{(XB)}} \right]$$

Apabila variabel bebas merupakan variabel kategori dengan dua kategori, katakan 1 dan 0 dengan kategori 0 sebagai referensi maka interpretasi koefisien pada variabel ini adalah rasio dari nilai odds untuk kategori 1 terhadap nilai Odds untuk kategori 0, ditulis sebagai berikut:

$$\Psi = \left[\frac{p^{(Xj=1)} / 1 - p^{(Xj=1)}}{p^{(Xj=0)} / 1 - p^{(Xj=0)}} \right] = \text{Exp}(\beta_j)$$

Artinya : resiko terjadinya peristiwa $Y = 1$ pada kategori $X1 = 1$ adalah sebesar (β_1) kali resiko terjadi peristiwa $Y = 1$ pada kategori $X1 = 0$. Apabila variabel bebas yang digunakan adalah variabel kontinyu, maka interpretasi dari koefisien adalah setiap kenaikan C unit satuan pada variabel bebas, akan mengakibatkan resiko terjadinya $Y = 1$ sebesar $(C \beta_j)$ kali lebih besar. (Nachrowi, 2002).

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

4.1 Gambaran Umum BMT

Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran secara umum mengenai BMT yang di jadikan sebagai penelitian

4.1.1. BMT Al-Barokah

4.1.1.1 Profil BMT Al-Barokah

BMT AL-Barokah didirikan pada tanggal 7 Januari 2008 oleh mahasiswa alumni STAIN Batusangkar dengan nomor badan hukum 61/BH/KPT-TD/Kop/VII/2009. Dengan adanya binaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek mereka ingin mengembangkan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di lingkungan Kabupaten Tanah Datar umumnya dan di Kecamatan Sungai Tarab khususnya, dengan berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi umat khususnya usaha mikro.

Setoran awal dalam mendirikan BMT Al-Barokah adalah Rp.16.000.000 yang setiap anggota harus menyeter sebesar Rp.200.000 dan kelipatannya. BMT ini berorientasi pada pelayanan masyarakat Kecamatan Sungai Tarab yang mengutamakan masyarakat dengan usaha ekonomi produktif seperti pedagang sayur, warung-warung kecil, pertanian dan industri rumah tangga.

Dengan target pada segmen usaha mikro, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat membantu perkembangan BMT ini dimana pihak BMT perlu

memahami karakteristik masyarakat serta nasabah agar nantinya keberadaan BMT dalam membantu pembiayaan serta pendanaan dapat terealisasi dengan baik.

4.1.1.2 Perkembangan Kinerja BMT Al-Barokah

Dalam merealisasikan kerja dan anggaran tahun 2010 KJKS BMT Al-Barokah telah mengoptimalkan seluruh potensi yang baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran pembiayaan, sehingga mampu mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat bawah/pedesaan atas akses dana perbankan serta mengurangi ketergantungan mereka kepada rentenier dan dapat membantu masyarakat yang selama ini ragu terhadap jasa keuangan mikro yang menggunakan sistem bunga.

Tabel 4.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga BMT Al-Barokah

Dana Pihak Ketiga	Tahun 2009	Tahun 2010
Simpanan Mudharabah	Rp.142.587.823	Rp.175.997.937
Deposito	Rp. 7.286.162	Rp. 13.263.596
Simpanan Wadiah	Rp. 19.000	Rp. 9.872.990

Sumber : RAT Tahun 2010

Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dalam bentuk simpanan dan deposito. Tahun 2010 jumlah DPK Rp. 199.134.523 meningkat sebesar Rp.49.241.529 dengan persentase peningkatan sebesar 24,73%. Dengan rincian simpanan wadiah padatahun 2009 hanya sebesar Rp.19.000 meningkat menjadi Rp.9.872.990 pada tahun 2010, untuk deposito pada tahun 2009 berjumlah sebesar Rp.7.286.162 meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp. 13.263.596 dan simpanan mudharabah sebesar Rp.142.587.823 pada tahun 2009

meningkat menjadi sebesar Rp. 175.997.937 pada tahun 2010 gambaran diatas menunjukkan bahwa BMT sudah dipercaya oleh masyarakat dalam rangka penempatan dana mereka dimana dana tersebut akan disalurkan kepada usaha produktif masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan

Tabel 4.2
Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Barokah

Jenis Pembiayaan	Tahun 2009	Tahun 2010
Murabahah	Rp. 93.768.744	Rp.121.033.500
Mudharabah	-	-
Qard	Rp. 14.000.000	Rp. 23.800.000

Sumber: RAT Tahun 2010

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota adalah untuk usaha ekonomi produktif dan sebagian berupa jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah), dan qard. Pada tabel diatas, jumlah pembiayaan yang diberikan per Desember 2010 berjumlah Rp.144.833.500 yang meningkat sebesar Rp.37.416.500 dengan persentase peningkatan sebesar 25,82%.

Dalam memberikan pembiayaannya, BMT terlebih dahulu harus memahami karakteristik karakteristik dari calon nasabahnya termasuk rumahtangga miskin yang sulit sekali memperoleh dana untuk kebutuhan usaha. Dimana pihak BMT terlebih dahulu melakukan survey serta mengidentifikasi apakah usaha mereka sesuai dengan syariat islam dan mengidentifikasi kemampuan pengembalian mereka nantinya agar tidak terjadinya penunggakan yang menghambat perkembangan usaha BMT yang memang bergantung dari kelancaran tingkat pengembalian mereka agar dana pengembalian tersebut dapat kembali disalurkan untuk usaha produktif lainnya. Rumahtangga miskin yang

memperoleh pembiayaan mikro dari BMT Al-Barokah adalah sebanyak 187 orang dengan berbagai usaha ekonomi produktif seperti usaha perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga.

4.1.2 BMT Al-Hikmah

4.1.2.1 Profil BMT Al-Hikmah

KJKS BMT Al-Hikmah dengan nomor badan hukum 63/BH/KPT-TD/X/2009 didirikan pada tanggal 7 januari 2008 yang diprakarsai oleh alumni mahasiswa STAIN Batusangkar yang ingin mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah dilingkungan Tanah Datar khususnya di Kecamatan Salimpaung dengan komitmen untuk mengembangkan ekonomi umat khususnya usaha mikro.

Dengan binaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek, BMT ini berdiri dengan modal awal sebesar Rp.15.000.000 yang setiap anggotanya harus menyetor minimal Rp.200.000 dan kelipatannya. Anggota yang telah menyatakan kesediaan dan menyetor untuk modal awal pertama menjadi anggota dari KJKS BMT dengan anggota pendiri sebanyak 22 orang.

Dengan target pada segmen usaha mikro, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat membantu perkembangan BMT ini dimana pihak BMT perlu memahami karakteristik masyarakat serta nasabah agar nantinya keberadaan BMT dalam membantu pembiayaan serta pendanaan dapat terealisasi dengan baik.

4.1.2.2 Kinerja BMT Al-Hikmah

Modal usaha KJKS BMT Al-Hikmah yang diperoleh dari simpanan anggota berbentuk simpanan pokok sebesar Rp.2.200.000, simpanan wajib Rp.2.200.000 dan simpanan sukarela Rp.12.600.000. selain simpanan anggota, BMT juga menghimpun dana berbentuk simpanan dari calon anggota yang berjumlah Rp.28.604.451 pada tahun 2010.

Kegiatan usaha KJKS BMT Al-Hikmah secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dengan akad wadiah yad dhamanah. Untuk penyaluran adalah pemberian dana dengan akad murabahah, mudharabah dan qard.

Tabel 4.3
Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Hikmah
Per Desember 2010

Jenis Pembiayaan	Tahun 2009	Tahun 2010
Murabahah	Rp. 80.298.300	Rp.89.627.652
Mudharabah	Rp. 4.100.000	Rp.10.100.000
Qard	Rp. 650.000	Rp. 400.000
Total	Rp. 85.048.300	Rp. 100.127.652

Sumber : RAT Tahun 2010

Jumlah pembiayaan yang telah disalurkan BMT pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.85.048.300 meningkat sebesar Rp.15.079.352. menjadi Rp. 100.127.652 pada tahun 2010. Jenis pembiayaan yang paling diminati adalah murabahah sebesar Rp.89.627.652 untuk tahun 2010 sedangkan pembiayaan mudharabah hanya sebesar Rp.10.100.000 dan untuk qard menurun pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.250.000 menjadi Rp.400.000. Kurang berkembangnya

produk mudharabah akibat masih sedikit nasabah yang berminat untuk mengambil pembiayaan tersebut.

Tabel 4.4
Perkembangan Dana Pihak Ketiga BMT Al-Hikmah

Dana Pihak Ketiga	Tahun 2009	Tahun 2010
Tabungan Mudharabah	Rp. 99.526.907	Rp. 138.065.473
Deposito Mudharabah	Rp. 10.243.279	Rp. 2.010.171
Tabungan Wadiah	Rp. 2.393.159	Rp. 28.156.738

Sumber : RAT Tahun 2010

Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun dalam bentuk simpanan dan deposito. Tahun 2010 jumlah DPK Rp. 168.232.382 meningkat sebesar Rp.56.069.037 dari tahun 2009 dengan persentase peningkatan sebesar 33,3%. Dengan rincian tabungan wadiah pada tahun 2009 sebesar Rp.2.393.159 meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp.28.156.738, untuk deposito mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp. 8.233.108 menjadi Rp.2.010.171 dan tabungan mudharabah pada tahun 2009 sebesar Rp.99.526.907 meningkat pada tahun 2010 menjadi Rp.138.065.473. Gambaran diatas menunjukkan bahwa keberadaan BMT sudah dipercaya oleh masyarakat dalam rangka penempatan dana mereka dimana dana tersebut akan disalurkan kepada usaha ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan.

4.2 Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah datar sampai saat sekarang masih belum dapat melepaskan diri dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dan informasi kemiskinan BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar mengalami

perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 4.6 berikut ini dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2004-2006 rata-rata terjadi kenaikan angka kemiskinan meskipun tahun 2007-2008 terjadi penurunan. Namun penurunan angka kemiskinan tersebut hanya 0,09% dari total penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar.

Penetapan jumlah penduduk miskin tersebut berdasarkan indikator garis kemiskinan yang dilihat dari pendapatan perkapita perbulan yang ditetapkan BPS tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel 4.5 dibawah ini juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terbesar bagi penduduk miskin pada tahun 2008 yaitu garis kemiskinan sebesar Rp.179.321. hal ini menandakan bahwa terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga pendapatannya dinilai semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 4.5
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar Tahun 2002-2008

Tahun	Jumlah penduduk Miskin	% Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2005	20.500	6,19	133.488
2006	25.400	7,61	172.040
2007	24.600	7,72	162.283
2008	23.800	7,52	179.321

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan BPS 2009

Gambaran kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009 dapat dirinci menurut kecamatan berdasarkan data kemiskinan BPS Kabupaten Tanah datar sementara. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 meningkat dari 20.500 jiwa menjadi 25.400 jiwa pada tahun 2006, namun pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 800 jiwa menjadi 24.600

dan sebesar 1600 jiwa menjadi 23.800 jiwa pada tahun 2008 Angka kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan konsep rumah tangga miskin, dimana jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Tanah Datar tahun 2007 yaitu sebesar 15.628 rumah tangga atau 17,66% dari jumlah rumah tangga keseluruhan. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi karena belum memenuhi target kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu ditargetkan angka kemiskinan turun 20% atau sebesar 14.000 rumah tangga miskin. Oleh karena itu program pengentasan kemiskinan semakin gencar dilakukan dan merupakan prioritas utama dalam Misi dan Agenda Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar 2.

Tabel 4.6
Jumlah dan Presentase Rumah Tangga Miskin Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)	(%)
1	X Koto	1.377	14,81
2	Batipuh	1.234	14,65
3	Batipuh Selatan	926	33,43
4	Pariangan	1.017	17,6
5	Rambatan	1.636	18,15
6	Lima Kaum	1.195	14,77
7	Tanjung Emas	956	16,61
8	Padang Ganting	431	10,67
9	Lintau Buo	586	12,13
10	Lintau Buo Utara	1.441	16,57
11	Sungayang	1.097	24,72
12	Sungai Tarab	1.559	18,88
13	Salimpaung	1.538	27,95
14	Tanjung Baru	635	17,47
Jumlah		15.628	17,66

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Rambatan yaitu sebesar 1.636

rumahtangga (18,15%), sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah rumah tangga miskinnya yaitu Kecamatan Padang Ganting yang berjumlah 431 rumah tangga (10,67%). Selain itu persentase rumah tangga miskin terbesar terdapat pada Kecamatan Batipuh Selatan yaitu 33,43% dari total rumah tangga di kecamatan tersebut dan selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Salimpaung 27,95% dan Kecamatan Sungayang 24,72% dimana penentuan jumlah rumah tangga miskin tersebut telah ditentukan pada indikator kemiskinan yang terdiri dari 14 indikator yang telah ditetapkan oleh BPS

4.2 Profil Responden

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.7
Distribusi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	%
1	Laki-laki	24	30,38
2	Perempuan	55	69,62
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari 79 responden rumah tangga miskin yang akses terhadap kedua BMT sebanyak 24 orang berjenis kelamin laki-laki atau 30,38% dan 55 orang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 69,62%.

(Panjaitan, 1999) menjelaskan bahwa Fokus dampak kredit mikro untuk perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dan efektif bagi pengentasan kemiskinan dimana dalam tulisan tersebut ingin mengetahui bahwa dampak kredit mikro untuk perempuan penerimanya mengarah pada pemberdayaan atau malah sebaliknya pembebanan bagi para perempuan penerimanya. Selain itu menurut

(Rose, 1992) bahwa akses perempuan terhadap sumberdaya khususnya modal dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. Dengan demikian, salah satu tujuan berdirinya lembaga keuangan mikro khususnya BMT dapat terealisasi dimana pembiayaan yang diberikan dapat memberdayakan perempuan yaitu penekanan pada upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memperluas akses terhadap BMT bagi para perempuan.

4.2.2. Tingkat Umur

Tabel 4.8
Distribusi Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Jumlah Responden	%
1	< 30	6	7,6
2	30-40	33	41,8
3	> 40	40	50,6
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT paling banyak berumur diatas 40 tahun sebesar 50,6 %, selanjutnya sebanyak 33 orang berumur antara 30-40 tahun sebesar 41,8 % dan yang paling sedikit yang berusia < 30 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 7,6%. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT merupakan Masyarakat yang produktif.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tabel 4.9
Distribusi Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	%
1	Tidak Pernah Sekolah	2	2,53
2	SD	17	21,53
3	SMP	39	49,36
4	SLTA	21	26,58
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga miskin akses BMT yang tidak pernah sekolah adalah sebanyak 2 orang atau 2,53%, yang berpendidikan SD sebanyak 17 orang atau 21,53%, rumah tangga yang berpendidikan SMP sebanyak 38 orang atau 29,36% dan yang berpendidikan SMA sebanyak 21 oran atau 26,58%

4.2.4 Rumah Tangga Miskin Akses BMT

Tabel 4.10
Distribusi Rumah Tangga Miskin Akses BMT

No	Rumah Tangga Miskin Akses BMT	Jumlah Responden	%
1	lebih dari 1 tahun	51	64,6
2	≤ 1 tahun	28	35,4
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil suvery

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang sudah akses terhadap BMT lebih dari satu tahun adalah sebanyak 51 orang atau 64,6%, berarti responden tersebut sudah berhubungan dengan BMT semenjak BMT tersebut didirikan yaitu pada tahun 2008 dimana pembiayaan yang mereka peroleh sudah lebih dari 5 kali. Sedangkan responden yang akses terhadap BMT kurang dari satu

tahun adalah sebanyak 21 atau 35,4% orang namun mereka sudah memperoleh pembiayaan lebih dari 2 kali dari BMT.

Gambaran diatas memperlihatkan bahwa responden yang akses terhadap BMT merasa bahwa keberadaan BMT benar-benar dapat memberikan dampak bagi kelangsungan usaha mereka dimana responden yang sudah akses terhadap BMT semenjak BMT didirikan sudah memperoleh pembiayaan lebih dari 5 kali. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan yang diperoleh berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha rumah tangga miskin dimana mereka juga dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan melalui pada tahap selanjutnya. Dengan kata lain setiap angsuran pembiayaan selesai dilunasi mereka kembali melakukan peminjaman berupa pembiayaan karena proses pencairan pembiayaan mudah, dan ada sebagian responden yang memperoleh pembiayaan melebihi kebutuhan usahanya, hal ini karena petugas BMT sudah mengenal karakter responden dengan baik sehingga memberikan pembiayaan melebihi dari yang diminta responden karena responden mampu melunasi pembiayaan tersebut.

4.2.5 Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Tenaga Kerja

Tabel 4.11
Distribusi Jumlah Tenaga Kerja dan Sumber Tenaga Kerja

No	Jumlah Tenaga kerja (orang)	Sumber Tenaga Kerja				Jumlah responden	%
		Keluarga	%	Non Keluarga	%		
1	1-2	51	98,1	1	1,9	52	62,8
2	3-4	26	96,3	1	3,7	27	37,2
Jumlah		77		2		79	

Sumber : data diolah dari hasil survey

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebanyak 52 orang responden atau 62,8% dari seluruh responden hanya memiliki tenaga kerja 1 sampai 2 orang tenaga kerja yang sebagian besar tenaga kerja tersebut berasal dari keluarga responden dengan jumlah 51 orang atau 98,1% dan hanya 1 orang responden yang mengandalkan tenaga kerja dari non keluarga. Sedangkan responden yang memiliki tenaga kerja 3 sampai 4 orang sebanyak 27 orang atau 37,2% dari keseluruhan responden. Dimana sebanyak 26 orang atau 96,3% mengandalkan tenaga kerja dari keluarga dan 1 orang responden atau sebesar 3,7% yang menggunakan tenaga kerja dari non keluarga. Responden yang memiliki tenaga kerja yang berasal dari keluarga pada umumnya mereka berusaha di bidang perdagangan seperti pedagang harian dan pedagang sayuran, sedangkan bagi responden yang mengandalkan tenaga kerja non keluarga berusaha dibidang pertanian, usaha perabot, dan industri rumah tangga yaitu pembuatan kerupuk ubi. Hal ini memperlihatkan bahwa usaha yang dijalankan rumah tangga miskin adalah usaha kecil yang pada umumnya merupakan usaha keluarga dengan mengandalkan tenaga kerja yang sedikit yang berasal dari anggota keluarganya.

4.2.6 Alasan Akan Tetap dan Tidak Akan Berhubungan dengan BMT

Tabel 4.12
Distribusi Alasan Responden Akan Tetap dan Tidak Akan Berhubungan Dengan BMT

No	Alasan Tetap Berhubungan	Jumlah Responden	%	Alasan Tidak Akan Berhubungan	Jumlah Responden	%
1	Karena BMT menggunakan sistem syariah	20	27,4	Tidak mau repot lagi dan menambah jumlah tanggungan/beban yang sudah ada	4	66,7
2	Sudah familier dengan petugas BMT	-	-	Takut tidak bisa mengembalikan pembiayaan tepat waktu mengingat pendapatan terbatas	2	33,3
3	Prosedur mudah dan persyaratan ringan	25	34,2			
4	Masih membutuhkan modal	28	38,4			
	Jumlah	73	100		6	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa alasan responden tetap berhubungan dengan BMT adalah 20 orang atau sebesar 27,4 % menjawab alasan mereka tetap berhubungan karena BMT menggunakan sistem syariah, sebanyak 25 orang atau 34,2 % menjawab karena prosedur dalam mengajukan pembiayaan di BMT mudah dan persyaratannya juga ringan dan sebesar 28 orang atau 38,4% menjawab bahwa mereka masih membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa bahwa alasan mereka

tetap berhubungan dengan BMT karena sudah familiar dengan petugas BMT. Selain itu terdapat 6 responden yang tidak akan berhubungan lagi dengan BMT dimana 4 responden atau 66,7 % menyatakan tidak mau repot lagi dan menambah beban jumlah tanggungan yang sudah ada dan sebanyak 2 orang atau 33,3% menjawab takut tidak bisa mengembalikan pembiayaan tepat waktu mengingat jumlah pendapatannya terbatas, meskipun usaha mereka berkembang namun ada faktor lain yang menyebabkan jumlah pendapatan tersebut terbatas salah satunya adalah terdapat responden yang juga memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan lain, Sehingga mereka juga harus melakukan pengembalian angsuran terhadap lembaga tersebut. Hal inilah yang menyebabkan beban tanggungan mereka menjadi bertambah.

Responden yang menyatakan tidak akan lagi berhubungan dengan BMT pada umumnya berusaha dibidang pertanian, karena mereka butuh jangka waktu lebih dari tiga bulan untuk memperlihatkan hasil dari usaha yang mereka jalankan. Untuk pengembalian angsuran hanya dilakukan oleh responden pada saat musim panen. Sebenarnya bagi usaha pertanian pembiayaan yang cocok diberikan dalam bentuk investasi berupa musyarakah atau mudharabah agar pengembalian angsuran dapat dilakukan pada saat musim panen tiba dan pengembalian dapat dilakukan sesuai kontrak dengan pihak BMT namun pada kenyataannya pembiayaan yang diberikan lebih banyak berbentuk jual beli atau murabahah hal ini dikarenakan responden masih banyak yang belum mengerti tentang produk yang ditawarkan pihak BMT serta bagaimana penerapan sistem syariah itu sendiri sehingga belum ada yang berminat untuk memperoleh pembiayaan dalam bentuk

investasi ini dan di lain pihak, BMT belum sepenuhnya berani mengambil resiko jika terjadi kegagalan pada hasil panen karena resiko tersebut juga akan berimbas kepada keberlangsungan BMT.

Selain itu dengan melihat pengalaman yang sudah ada untuk usaha pertanian rumah tangga miskin itu sendiri sebaiknya dilakukan pembiayaan dalam bentuk kelompok karena kelompok merupakan sarana kerjasama dan sharing modal usaha dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dimana anggota kelompok yang mengalami kesulitan dalam hal pengembalian angsuran akan menjadi tanggung jawab anggota kelompok lainnya untuk menemukan jalan keluarnya karena pada prinsipnya pendekatan kelompok dapat mengurangi resiko gagal bayar dengan memanfaatkan kelembagaan sosial. Namun karena keterbatasan penyaluran dana di BMT sendiri apalagi untuk pembiayaan dalam bentuk kelompok belum dapat direalisasikan mengingat jumlah penyaluran dana minimal Rp.10.000.000 bagi setiap kelompok, sedangkan untuk nasabah yang ingin meminjam maksimal pembiayaan yang diperoleh hanya sebesar Rp.7.000.000 di kedua BMT dengan jangka waktu pengembalian ditentukan oleh pihak BMT.

4.2.7 Tingkat Pengetahuan Terhadap Sistem Bagi Hasil

Tabel 4.13

Distribusi Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Sistem Bagi Hasil

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden	%
1	Mengerti	21	26,6
2	Sedikit Mengerti	27	34,2
3	Tidak Mengerti	31	39,2
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Dari tabel 4.12 terlihat bahwa tingkat pengetahuan responden terhadap sistem bagi hasil, hanya 21 orang yang menyatakan bahwa mereka mengerti dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT atau sebesar 26,6% walaupun pada tabel 4.10 jumlah responden yang tetap berhubungan dengan BMT dengan alasan prinsip syariah yang diterapkan oleh BMT sebanyak 24 orang namun alasan tersebut tidak menjadi patokan dari pengetahuan responden terhadap sistem bagi hasil tersebut. Sebanyak 27 orang dari responden yang menyatakan sedikit mengerti atau 34,2% dan 31 orang menyatakan mereka tidak mengerti dengan sistem bagi hasil atau sebesar 39,2%. Artinya pengetahuan masyarakat terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT masih sangat minim dan belum sepenuhnya mereka mengetahui bagaimana sistem syariah tersebut dijalankan oleh BMT dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah serta pembagian keuntungan dalam bentuk margin. Selain itu masih ada responden yang menganggap bahwa margin keuntungan yang diperoleh sama dengan bunga dan selalu membandingkan margin keuntungan tersebut dengan bunga.

4.2.8 Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha Rumah Tangga Miskin

Tabel 4.14

Distribusi Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha Rumah Tangga Miskin

No	Dampak Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha	Jumlah Responden	%
1	Meningkat	72	91,1
2	Tetap	6	8,9
3	Menurun	-	-
Jumlah		79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Pada tabel 4.13 diperlihatkan bahwa sebanyak 72 responden atau sebanyak 91,1% menyatakan bahwa pembiayaan yang diperoleh rumah tangga miskin dari BMT secara prakteknya telah memberikan dampak dimana usaha responden sudah mengalami peningkatan, dimana dana pembiayaan yang sudah diterima responden umumnya dimanfaatkan untuk menambah modal usaha, memperluas tempat usaha, membeli kebutuhan barang untuk usaha, menambah asset usaha dan membuat usaha baru. sebanyak 7 responden atau sebesar 8,9% menyatakan bahwa perkembangan usaha mereka dirasakan belum meningkat hal ini dikarenakan pembiayaan yang diperoleh tidak direalisasikan secara baik, dimana pembiayaan yang diperoleh masih digunakan untuk untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk pendidikan dan pembiayaan kesehatan sehingga mereka belum merasakan dampak dari adanya pembiayaan bagi perkembangan usaha mereka sendiri.

Namun dampak positif yang dirasakan dari adanya pembiayaan mikro BMT ini yang diperoleh responden adalah bahwa setiap usaha responden baik itu usaha perdagangan maupun usaha non perdagangan yang dijalankan responden tidak ada yang mengalami penurunan dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan.

Secara keseluruhan profil dari rumah tangga miskin akses BMT dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.15
Distribusi Profil Responden Akses BMT

Jenis Kelamin	Laki-laki = 30,38% Perempuan = 69,62%
Tingkat umur	>30 = 7,6% 30-40 = 41,8% >40 = 50,6%
Tingkat Pendidikan	Tidak Pernah Sekolah = 2,53% SD = 21,53% SMP = 49,36% SLTA = 26,58%
Rumah Tangga Miskin Akses BMT	> 1 tahun = 64,6% ≤ 1 tahun = 35,4%
Jumlah tenaga Kerja	1-2 orang = 62,8% 3-4 orang = 37,2%
Tingkat pengetahuan Terhadap Sistem Bagi Hasil	Mengerti = 26,6% Sedikit Mengerti = 34,2% Kurang Mengerti = 39,2%
Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Perkembangan Usaha	Meningkat = 91,1% Tetap = 8,9%



BAB V ANALISI DATA DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Analisa Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rumah tangga miskin di Kabupaten Tanah Datar akses terhadap BMT dengan mengambil 79 responden dari seluruh nasabah pembiayaan tersebut.

5.1.1 Profil Usaha dan Akses BMT

Berdasarkan hasil pengolahan data survey, maka diperoleh informasi mengenai profil usaha rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT. Profil usaha merupakan variabel yang diduga berpengaruh positif terhadap rumah tangga miskin akses. Dalam penelitian ini digunakan sampel yaitu rumah tangga miskin dengan usaha perdagangan rumah dan usaha non perdagangan seperti pertanian, jasa, dan industri tangga.

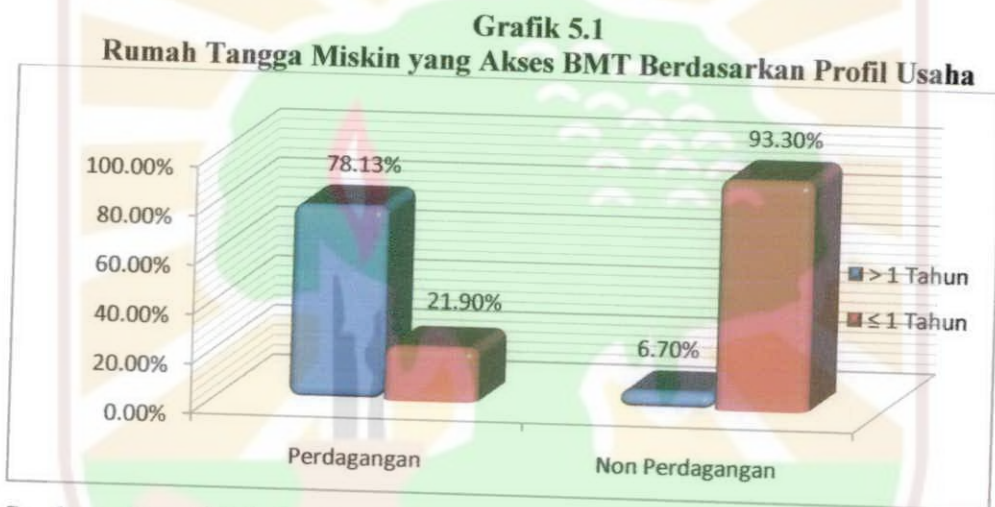
Tabel 5.1
Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Profil Usaha

Profil Usaha	Akses BMT				Total	
	> 1 Tahun	%	≤ 1 Tahun	%	Jumlah	%
Perdagangan	50	78,13	14	21,9	64	81,01
Non Perdagangan	1	6,7	14	93,3	15	18,99
Total	51	64,6	28	36,7	79	100

Sumber : diolah dari hasil survey

Tabel 5.1 memperlihatkan rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT berdasarkan profil usaha. Dari 79 responden, terdapat 64 responden (81,01%) dengan profil usaha perdagangan dan sebanyak 15 responden (18,99%) yang mempunyai usaha no perdagangan. Rumah tangga miskin yang akses dengan

BMT > 1 tahun dengan usaha perdagangan lebih besar yaitu sebanyak 50 responden (78,13%) dibandingkan dengan rumah tangga miskin dengan usaha non perdagangan yaitu hanya 1 responden (6,7%). Sedangkan rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT \leq 1 tahun dengan usaha perdagangan sebanyak 14 responden (21,9%) sama dengan jumlah rumah tangga miskin dengan usaha non perdagangan yaitu sebanyak 14 responden (93,3%). Gambaran lebih jelasnya disajikan dalam grafik 5.1



Sumber : data diolah dari hasil survey

grafik 5.1 memperlihatkan dengan jelas bahwa persentase rumah tangga miskin dengan usaha perdagangan yaitu 78,13% lebih besar dari rumah tangga miskin yang akses BMT dengan usaha non perdagangan yang hanya sebesar 6,7%. pada golongan rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun. Sedangkan persentase rumah tangga miskin dengan usaha non perdagangan pada golongan rumah tangga miskin yang akses BMT \leq 1 tahun yaitu sebesar 93,3% lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin dengan usaha perdagangan yaitu sebesar 21,90%.

Jadi pada penelitian ini, rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT > 1 tahun cenderung berusaha dibidang perdagangan, dan rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT \leq 1 tahun cenderung berusaha di bidang non perdagangan seperti pertanian, jasa dan industri rumah tangga. Jadi profil usaha dari responden menyebabkan rumah tangga miskin akses terhadap BMT yang dikarenakan kesulitan akan permodalan dalam rangka mengembangkan usaha mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan sebab usaha yang mereka jalankan tergolong usaha kecil dan merupakan usaha keluarga..

5.1.2 Kepatuhan Pengembalian dan Akses BMT

Kepatuhan pengembalian merupakan salah satu variabel yang diduga berpengaruh terhadap rumah tangga miskin untuk akses terhadap kedua BMT. Dalam penelitian ini digunakan sampel rumah tangga miskin dengan tingkat kepatuhan pengembalian pembiayaan dalam kondisi lancar dan kurang lancar (tertatih-tatih mengembalikan pembiayaan atau macet)

Tabel 5.2
Rumah Tangga Miskin Yang Akses BMT Berdasarkan Kepatuhan Pengembalian

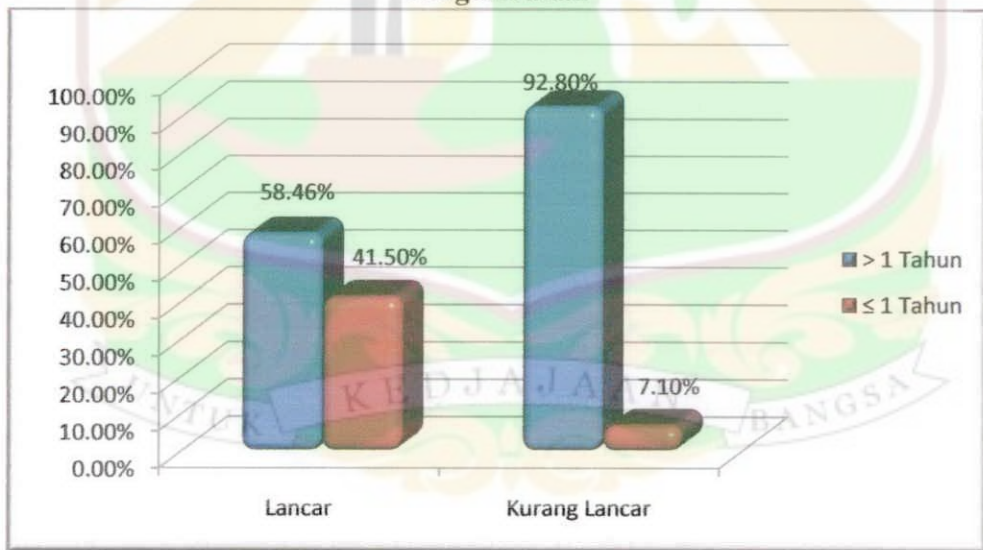
kepatuhan pengembalian	Akses BMT				Total	
	> 1 Tahun	%	\leq 1 Tahun	%	Jumlah	%
Lancar	38	58,46	27	41,5	65	82,3
Kurang Lancar	13	92,8	1	7,1	14	17,7
Total	51	63,3	28	36,7	79	100

Sumber : data diolah dari hasil servey

Pada tabel 5.2 dari 79 responden, terdapat sebanyak 65 responden (82,3%) yang lancar dalam melakukan pengembalian pada BMT dan sebanyak 14 responden (17,7%) yang mengalami kesulitan dalam arti tertatih-tatih untuk

melakukan pengembalian. Jika dilihat dari rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT, rumah tangga miskin yang akses BMT >1 tahun yaitu sebanyak 38 responden (58,46%) yang patuh mengembalikan pembiayaan tepat pada waktunya dengan lancar atau sesuai kontrak dengan pihak BMT. Rumah tangga miskin yang kurang lancar dalam mengembalikan pembiayaan kepada BMT sebanyak 13 responden (92,8%). Sedangkan rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun yaitu sebanyak 27 responden (41,5%) yang lancar dalam melakukan pengembalian pada BMT jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang kurang lancar melakukan pengembalian yaitu hanya 1 responden (7,1%). Untuk lebih jelasnya maka berikut ini disajikan grafik rumah tangga miskin akses BMT berdasarkan kepatuhan pengembalian.

Grafik 5.2
Rumah Tangga Miskin yang Akses BMT Berdasarkan Kepatuhan Pengembalian



Sumber : data diolah dari hasil survey

Grafik 5.2 memperlihatkan bahwa persentase rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun lebih cenderung mengembalikan pembiayaan kurang lancar

yaitu sebesar 92,8% bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sesuai dengan kontrak atau lancar sebesar 58,46%. Sedangkan untuk rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun dapat dilihat bahwa sebesar 41,5% lancar dalam mengembalikan pembiayaan kepada pihak BMT yang sesuai dengan kontrak dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang kurang lancar dalam melakukan pengembalian yaitu sebesar 7,1%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun cenderung kurang lancar atau sebesar 92,8% dalam mengembalikan pembiayaan hal ini dikarenakan responden berusaha secara berkeliling artinya setiap ada pasar diberbagai nagari mereka melakukan usaha perdagangan disana. Sehingga untuk mengangsur pembiayaan kepada BMT tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau ada keterlambatan pengembalian, selain itu jangka waktu pengembalian angsuran juga ditentukan oleh pihak BMT.

Keadaan semacam inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya penunggakan yang berakhir kemacetan terhadap pengembalian pembiayaan dan tentu hal ini ikut memperlambat perkembangan BMT karena perputaran dana yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sedangkan kelangsungan hidup dari BMT sendiri bergantung pada kelancaran dana pembiayaan. Meskipun pihak BMT menerapkan sistem jemput bola dimana petugas BMT mendatangi tempat usaha atau tempat tinggal nasabah untuk menjemput angsuran pembiayaan tersebut, namun metode tersebut belum sepenuhnya diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan. Hal ini disebabkan

karena jumlah sumberdaya serta transportasi yang dimiliki oleh pihak BMT masih terbatas.

5.1.2 Reborrowing dan Akses BMT

Reborrowing atau peminjaman kembali merupakan variabel yang diduga berpengaruh positif terhadap rumah tangga miskin untuk akses terhadap BMT. Dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah apakah rumah tangga miskin akan melakukan peminjaman kembali kepada BMT atau tidak.

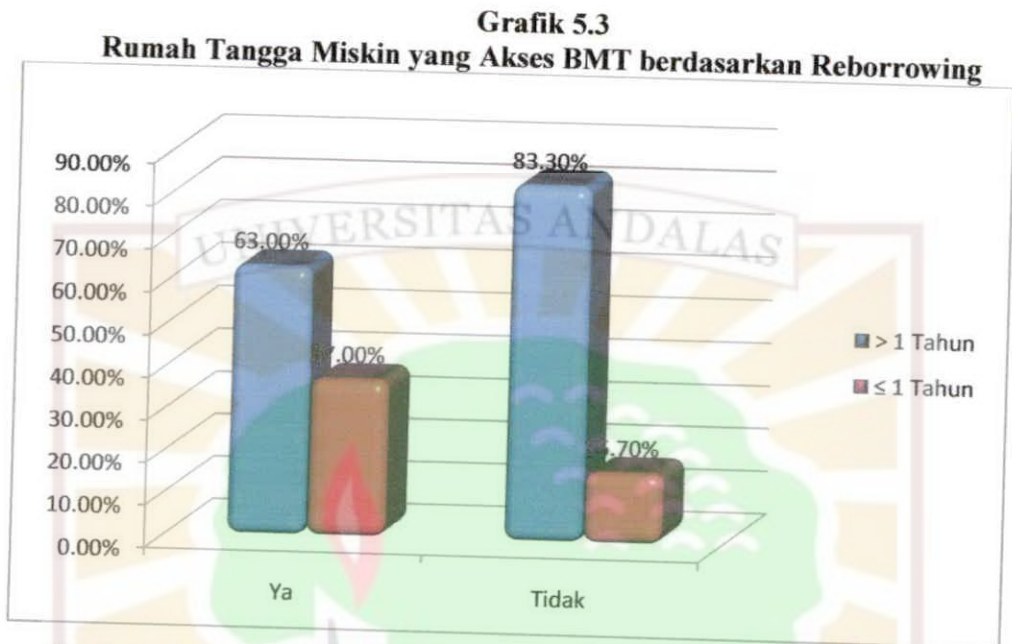
Tabel 5.3
Rumah Tangga Miskin Akses BMT berdasarkan Reborrowing

Reborrowing	Akses BMT				Total	
	> 1 Tahun	%	≤ 1 Tahun	%	Jumlah	%
Ya	46	63	27	37	73	92,4
Tidak	5	83,3	1	16,7	6	7,6
Total	51	64,6	28	35,4	79	100

Sumber : data diolah dari hasil survey

Pada tabel 5.3 terlihat bahwa rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT menyatakan bahwa sebanyak 7 responden (92,4%) akan kembali melakukan pinjaman kepada BMT dan sebanyak 6 responden atau 7,6% tidak akan berhubungan lagi dengan BMT. Jika dilihat dari rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun sebanyak 46 responden atau 63% akan tetap melakukan pinjaman kembali kepada BMT dan sebanyak 5 responden atau 83,3% tidak akan berhubungan lagi dengan BMT. Sedangkan rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun sebanyak 27 responden atau 37% akan tetap melakukan pinjaman kepada BMT dan hanya 1 responden atau 16,7% tidak akan berhubungan lagi

dengan BMT. Untuk melihat gambaran lebih jelasnya akan disajikan pada grafik 5.3 dibawah ini



Sumber : data diolah dari hasil survey

Grafik 5.3 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga miskin yang melakukan peminjaman kembali (reborrowing) sebesar 63% untuk golongan rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun. Sedangkan untuk rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun yang ingin melakukan peminjaman kembali adalah sebesar 37%. Dan untuk rumah tangga miskin yang tidak akan melakukan peminjaman kembali adalah sebesar 83,3% untuk golongan rumah tangga miskin yang akses BMT > 1 tahun dan sebesar 16,7% untuk golongan rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, peran pembiayaan BMT terhadap rumah tangga miskin masih dibutuhkan. Hal ini dilihat dari besarnya persentase rumah tangga miskin yang ingin melakukan peminjaman

kembali atau reborrowing yaitu sebesar 65,7% bagi rumah tangga miskin akses BMT > 1 tahun dan untuk golongan rumah tangga miskin yang akses BMT ≤ 1 tahun sebesar 34,3%. Berbagai alasan yang melatar belakangi rumah tangga ini untuk tetap berhubungan dengan BMT. Di BAB IV pada tabel 4.10 memperlihatkan bahwa alasan rumah tangga miskin tetap berhubungan dengan BMT adalah sebesar 27,4% dengan alasan bahwa BMT menggunakan prinsip syariah, 34,2% menyatakan dengan alasan prosedur murah dan persyaratan yang ringan dan 38,4% menyatakan alasan tetap berhubungan dengan BMT karena masih membutuhkan modal. Meskipun ada rumahtangga miskin yang tidak akan berhubungan atau melakukan pinjaman lagi dengan BMT namun persentasenya hanya sedikit sekali yaitu hanya sebesar 7,6% dari total keseluruhan.

5.2 Analisa Regresi Logistik

5.2.1 Persamaan Regresi Logistik dan Odd Ratio

Dari hasil pengolahan data terhadap akses BMT di peroleh nilai $G(2\text{-loglikelihood})$ pada blok pertama (block number = 0) sebesar 102,723 sedangkan nilai $G(2\text{-loglikelihood})$ pada blok kedua (block number = 1) adalah sebesar 68,911 maka terjadi penurunan nilai $G(2\text{-loglikelihood})$ pada blok kedua dibandingkan blok pertama dan dapat disimpulkan bahwa model kedua regresi lebih baik dalam memprediksi probability rumah tangga miskin akses BMT.

Berdasarkan hasil regresi logistik akses BMT diperoleh nilai overall (overall percentage) sebesar 81,0%, ini berarti bahwa secara bersama-sama variasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 81,0%.

Untuk melihat variabel independen apa saja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rumah tangga miskin akses BMT dapat dilihat dari signifikansinya. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka dikatakan variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika variabel independen mempunyai nilai signifikan kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Sebelum melakukan proses regresi logistik, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi variabel sesama variabel independen untuk melihat keeratan hubungan antar variabel. Jika terdapat hubungan yang sangat kuat antar sesama variabel maka diasumsikan telah terjadi multikolinearitas dimana koefisien korelasi antara masing-masing variabel lebih dari 0,70 (Agung, 2005). Untuk menguji hal ini, maka salah satu variabel yang tingkat hubungannya sangat kuat harus dihilangkan. Maka pada tabel 5.4 akan dijelaskan hasil uji korelasi pearson antar variabel bebas untuk mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinearitas.

Tabel 5.4
Hasil Uji Korelasi Pearson Antar Variabel Bebas

		Constant	PU	KP	RBW
Step 1	Constant	1,000	-,118	-,732	-,530
	PU	-,118	1,000	-,282	-,308
	KP	-,732	-,282	1,000	,111
	RBW	-,530	-,308	,111	1,000

Sumber : data diolah 2011

Setelah diuji korelasi terhadap variabel independen dengan uji X^2 atau pearson ternyata tidak terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel

independen yakni tidak lebih dari 0,70 sehingga model dapat dikatakan terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas dan demikian proses logistik dapat dilakukan.

Interpretasi koefisien- koefisien dalam model regresi logistik dilakukan dalam bentuk Odds Ratio atau dalam adjusted probability (probabilitas yang disesuaikan) yang dalam output ditulis eksponen B atau Exp B yang dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.5
Hasil Estimasi Koefisien, Signifikansi dan Odd Ratio (Exp B) Akses BMT

Variabel	B	Sig	Odd Ratio (Exp B)
PU	4,187	,001	65,831
KP	-1,915	,297	,147
RBW	2,860	,040	8,057
Constant	1,409	,518	4,093

Signifikansi pada taraf uji $\alpha = 5\%$

Dari tabel diatas maka diperoleh bentuk persamaan hasil regresi logistik yaitu sebagai berikut:

$$\ln \left\{ \frac{p}{1-p} \right\} = 1,409 + 4,187 \text{ PU} - 1,915 \text{ KP} + 2,860 \text{ RBW}$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa konstanta atau intersepnya adalah sebesar 1,409 yang berarti bahwa pada saat semua variabel independen yaitu profil usaha, kepatuhan pengembalian dan reborrowing dianggap sama dengan nol, maka

$$\ln \left\{ \frac{p}{1-p} \right\} = 1,409 \rightarrow \left\{ \frac{p}{1-p} \right\} = e^{1,409}$$

Dengan demikian, besarnya peluang rumah tangga miskin akses BMT dari beberapa karakteristik tersebut adalah:

$$\pi(x) = \frac{e^{1,409}}{1 + e^{1,409}} = \frac{4,0918}{5,0918} = 0,803$$

Dengan kata lain, probabilita atau peluang rumah tangga miskin untuk akses BMT > 1 tahun dengan karakter tersebut diatas adalah sebesar 0,803 atau 80,3%.

5.2.2 Hasil Estimasi Regresi Logistik Variabel Independen

Dari hasil output pada tabel 5.5 diatas, ternyata dari tiga variabel yang dianggap mempengaruhi rumah tangga miskin akses BMT di Kabupaten Tanah Datar, hanya dua variabel yang mempunyai pengaruh signifikan yaitu profil usaha rumah tangga dan reborrowing terhadap BMT. Sedangkan tingkat kepatuhan pengembalian mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

5.2.2.1. Profil Usaha

Variabel profil usaha mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rumah tangga miskin akses BMT. Penemuan empiris memperlihatkan bahwa slope variabel profil usaha rumah tangga miskin akses BMT mempunyai parameter 4,187. Ini berarti proporsi profil usaha perdagangan rumah tangga miskin akses BMT lebih besar dibandingkan dengan proporsi profil usaha non perdagangan rumah tangga miskin akses BMT. Jika dilihat dari odd ratio yaitu sebesar 65,831 artinya kecenderungan atau peluang rumah tangga miskin akses BMT dengan profil usaha perdagangan adalah sebesar 65,831 kali peluang rumah tangga miskin akses BMT dengan usaha non perdagangan. Dengan kata lain, rumah tangga miskin yang akses BMT dengan usaha perdagangan lebih besar

peluangnya dibandingkan rumah tangga miskin akses BMT dengan usaha non perdagangan.

Dengan asumsi variabel lain nol, maka peluang yang didapat berdasarkan perhitungan 0,9850. Ini berarti peluang rumah tangga miskin akses BMT dengan karakteristik diatas adalah sebesar 98,5%

5.2.2.2. Kepatuhan Pengembalian

Variabel kepatuhan pengembalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap rumah tangga miskin untuk akses terhadap BMT. Artinya bahwa pengklasifikasian kepatuhan pengembalian tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap rumah tangga miskin akses BMT, apakah rumah tangga miskin tersebut lancar atau kurang lancar untuk mengembalikan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap rumah tangga miskin akses BMT. Hal ini disebabkan karena masih adanya keterlambatan pengembalian yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan dalam pengembalian pembiayaan rumah tangga miskin terhadap BMT. Dimana akibat kemacetan tersebut akan berpengaruh buruk pada pemberian pembiayaan selanjutnya bagi rumah tangga miskin yang ingin akses terhadap BMT.

Pendapat tersebut didukung juga oleh Agus Suman yang menyatakan bahwa tunggakan atau kemacetan angsuran menyebabkan pemanfaatan dana kredit akan tertunda bagi masyarakat yang ingin mengajukan kredit selanjutnya (Suman, 2006).

Mosher, (1996) dalam Renggani, (1998) menyatakan bahwa suatu program perkreditan dikatakan efisien apabila mudah didapatkan oleh sasaran program dan nasabah dapat mengembalikannya tepat waktu. Jadi keberhasilan suatu program perkreditan tidak hanya dilihat dari jumlah kredit yang berhasil disalurkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Tetapi kredit menjadi tidak berarti apabila ternyata ada permasalahan dalam hal pengembaliannya. Pengembalian kredit yang macet akan mempengaruhi jalannya perkreditan selanjutnya.

Selain itu faktor lokasi usaha nasabah seperti usaha perdagangan yang dilakukan kepasar-pasar, jumlah sumberdaya atau petugas BMT serta keterbatasan transportasi juga mempengaruhi kurang lancarnya pengembalian angsuran nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Renggani (1998), diperoleh hasil bahwa biaya transportasi mempengaruhi nasabah untuk mengunjungi BMT dimana semakin besar biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk menuju lokasi BMT dalam rangka mengangsur pembiayaan, membuat nasabah semakin enggan untuk mengunjungi BMT. Dengan demikian semakin kecil tingkat pengembalian pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

5.2.2.3. Reborrowing

Variabel reborrowing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rumah tangga miskin akses BMT. Parameter variabel reborrowing adalah sebesar 2,860 yang berarti proporsi rumah tangga miskin reborrowing terhadap BMT

lebih besar dibandingkan proporsi rumah tangga miskin untuk tidak melakukan pinjaman atau reborrowing terhadap BMT. Dari jika dilihat dari nilai odd ratio sebesar 8,057 artinya kecenderungan rumah tangga miskin reborrowing terhadap BMT adalah sebesar 8,057 kali dibandingkan dengan rumah tangga miskin untuk tidak reborrowing terhadap BMT

Dengan asumsi variabel lain nol, setelah dihitung nilai peluangnya maka didapatkan sebesar 0,9458 yang berarti peluang rumah tangga miskin akses BMT dengan karakteristik diatas adalah sebesar 94,58%.

5.3 Implikasi Kebijakan

Bertitik tolak dari hasil penelitian, diuraikan bagaimana implikasi penelitian. Dari penelitian ini didapat bahwa peran pembiayaan mikro BMT dapat membantu permasalahan yang dihadapi rumah tangga miskin. Dimana pembiayaan yang diperoleh dipergunakan sebagai modal usaha yang pada dasarnya merupakan faktor penghambat dalam membangun usaha serta mengembangkan usaha yang sudah ada. Meskipun masih ada rumah tangga miskin yang mempergunakan pembiayaan tersebut untuk keperluan konsumtif seperti pendidikan dan kesehatan namun secara keseluruhan pembiayaan yang diperoleh direalisasikan untuk usaha ekonomi produktif.

Pada umumnya rumah tangga yang akses terhadap BMT bergerak pada usaha perdagangan yang mayoritas berdagang harian dan sayuran, dan untuk usaha non perdagangan cenderung bergerak dibidang pertanian dan jasa. lokasi tempat usaha menjadi penghambat rumah tangga miskin untuk mengembalikan

pembiayaan, yang menyebabkan adanya keterlambatan pengembalian dan pada akhirnya menyebabkan kemacetan. Namun hal ini tidak menghambat keinginan rumah tangga miskin untuk tetap berhubungan atau akses terhadap pembiayaan karena semenjak memperoleh pembiayaan dari BMT kegiatan usaha yang mereka jalankan sudah dirasakan mengalami perkembangan dan peningkatan sehingga dampak yang dirasakan bahwa pembiayaan mikro dari BMT ini dapat mengeluarkan mereka dari permasalahan modal dan belenggu kemiskinan.

Agar peran pembiayaan mikro BMT dapat mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai sehingga jurang pemisah antara sikaya dan simiskin dapat dikurangi, maka diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kedisiplinan rumah tangga miskin dalam kepatuhan pengembalian agar mereka lebih konsisten untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai kontrak dengan pihak BMT. Sehingga nantinya tidak terjadi hambatan penyaluran pembiayaan bagi rumah tangga miskin yang akan berhubungan dengan BMT akibat kemacetan pengembalian yang terjadi. Keberadaan lokasi usaha serta besarnya biaya transportasi merupakan salah satu faktor penyebab adanya keterlambatan pengembalian pinjaman karena usaha rumah tangga miskin pada umumnya terpisah dari rumah sehingga semakin besar biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk menuju BMT membuat nasabah enggan untuk mengunjungi BMT. Disamping itu

rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT masih banyak yang belum paham dengan prinsip syariah yang dijalankan oleh BMT karena alasan mereka untuk tetap berhubungan dengan BMT bukan karena prinsip syariah yang dijalankan tetapi lebih ke prosedur yang mudah serta modal yang dirasa masih diperlukan. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan yang lebih intensif lagi kepada nasabah seperti memberikan penyuluhan tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan.

2. Bagi usaha non perdagangan seperti pertanian sebaiknya di berikan pembiayaan dalam bentuk investasi seperti mudharabah dan musyarakah bukan murabahah karena jenis usaha ini bersifat musiman dan pendapatan yang diperoleh nasabah pun diperoleh pada saat musim panen sehingga dalam pengembalian angsuran nasabah tidak mengalami keterlambatan karena jangka waktu pengembalian dapat ditentukan pada saat musim panen tiba
3. Meningkatkan peran pembiayaan mikro bagi rumah tangga miskin. Dimana pemberian pembiayaan ini bukan hanya ditingkatkan dari segi jumlahnya saja tetapi juga dibutuhkan binaan terhadap usaha nasabah karena salah satu tujuan didirikannya BMT adalah membantu membina usaha kerakyatan baik untuk penciptaan usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada agar keberadaan BMT dapat meningkatkan pendapatan demi mencapai kesejahteraan hidup mereka.

4. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan BMT karena peran lembaga ini mampu mengatasi masalah kemiskinan khususnya di Kabupaten Tanah Datar

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki keterbatasan mengingat penelitian ini hanya terfokus pada rumah tangga miskin yang akses hanya terhadap dua BMT di dua kecamatan. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar sudah terdapat empat BMT yang tersebar di empat kecamatan agar nantinya peran pembiayaan mikro BMT dapat memberikan gambaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penelitian yang sangat singkat.

Oleh karena itu disarankan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih mengkaji bagaimana faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin yang akses BMT dengan membandingkan dinamika usaha rumah tangga miskin yang akses di setiap BMT yang berada di empat kecamatan di kabupaten tersebut dengan melihat dampak dari pembiayaan mikro BMT dengan menambah jumlah variabel-variabel dari faktor yang mempengaruhi rumah tangga miskin akses terhadap BMT yang mungkin akan diteliti mengingat target penurunan tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar belum memenuhi target yaitu sebesar 20% setiap tahunnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa peran pembiayaan mikro dari kedua BMT di Kabupaten Tanah Datar mampu mengatasi masalah permodalan bagi rumah tangga miskin. Dengan karakteristik responden yang akses terhadap BMT adalah masyarakat produktif dengan umur berkisar 30-40 tahun keatas. Untuk rumah tangga miskin yang akses terhadap BMT > 1 tahun sebesar 64,6% telah memperoleh pembiayaan lebih dari 5 kali, hal ini membuktikan bahwa pembiayaan yang diperoleh dapat membantu dalam perkembangan usaha mereka meskipun tingkat pengetahuan mereka terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan BMT masih sangat minim sekali. Rumah tangga miskin yang akses BMT rata-rata memiliki tenaga kerja yang berasal dari keluarga yang berkisar antara 1-2 orang, dimana usaha yang mereka jalankan merupakan usaha keluarga. Dengan adanya pembiayaan mikro BMT ini, dampak yang dirasakan rumah tangga miskin terhadap usaha mereka adalah usaha yang dijalani sudah mengalami peningkatan dengan penggunaan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, menambah asset usaha, dan untuk membuat usaha baru.

Jika dilihat dari hasil analisa logistik dari tiga variabel independen yang mempengaruhi rumah tangga miskin akses BMT hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap rumah tangga miskin akses BMT yaitu variabel profil usaha dan reborrowing. Sedangkan variabel lainnya yaitu kepatuhan pengembalian tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rumah tangga miskin akses BMT.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga miskin yang memperoleh pembiayaan dari BMT pada umumnya berusaha dibidang perdagangan terutama pedagang harian dan sayuran. Meskipun ada rumah tangga miskin akses BMT yang berusaha dibidang non perdagangan seperti industri, jasa dan pertanian namun persentasenya hanya sedikit sekali. Besarnya rumah tangga miskin yang memperoleh pembiayaan dengan usaha perdagangan membuktikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk modal usaha dan hanya sedikit sekali yang mempergunakan pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan dan kesehatan. adanya keinginan rumah tangga miskin untuk melakukan peminjaman kembali (reborrowing) membuktikan bahwa pembiayaan BMT masih sangat diharapkan dengan alasan sebesar 27,4% menyatakan bahwa BMT menggunakan prinsip syariah, sebesar 34,2% menyatakan bahwa prosedur mengajukan pembiayaan ke BMT murah dan persyaratan yang ringan dan sebesar 38,4% menyatakan akan tetap berhubungan dengan BMT karena masih membutuhkan modal. Meskipun ada rumah tangga miskin yang tidak akan melakukan reborrowing namun persentasenya hanya sedikit sekali yaitu hanya sebesar 7,6% dari total keseluruhan. Jadi, semakin tinggi akses rumah tangga miskin ke BMT membuktikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT memiliki dampak terhadap keberlangsungan usaha mereka sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dari pengamatan dan wawancara penulis dengan para responden, ternyata masih banyak responden yang masih belum paham akan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT. Sehingga alasan mereka untuk akses terhadap BMT bukan karena sistem syariah yang diterapkan tetapi lebih kepada prosedur yang mudah dan kebutuhan akan permodalan. Untuk itu penulis berharap pihak BMT bisa memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih jelas bagaimana penerapan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh BMT beserta penetapan margin keuntungan yang diperoleh kepada nasabah.
2. Pihak BMT sendiri diharapkan bisa memberikan pembinaan kepada usaha nasabah khususnya rumah tangga miskin karena tujuan didirikannya BMT adalah membantu usaha kerakyatan baik untuk penciptaan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada agar keberadaan BMT dapat dapat dirasakan manfaatnya yaitu meningkatnya pendapatan demi mencapai kesejahteraan hidup mereka dan mereka dapat keluar dari belenggu kemiskinan.
3. Diharapkan agar pihak BMT memberikan kemudahan khususnya bagi rumah tangga miskin untuk menentukan jangka waktu pengembalian angsuran dan metode jempot bola yang diterapkan oleh piha BMT

dapat terealisasi dengan agar agar menghindari adanya penunggakan serta kemacetan pengembalian

4. Bagi yang ingin meneliti tentang peran pembiayaan BMT lebih lanjut dapat menggunakan metode-metode pengolahan data yang lain. Agar hasil yang diinginkan lebih tajam dan mendalam akan lebih baik menambah atau memasukkan variabel-variabel bebas lainnya.
5. BMT mempunyai peran dalam memberdayakan ekonomi kecil dan mikro baik yang berupa penghimpunan dana maupun peminjaman dana, akan tetapi BMT di Kabupaten Tanah Datar belum bisa menjalankan fungsinya sebagai baitul mal yaitu bertugas untuk menjalankan misi sosial karena penghimpunan zakat, infaq dan sedekah serta produk pembiayaan qarghul hasan belum terlaksana dengan baik pada kedua BMT yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Rahmawita. 2009. *Analisis Penyaluran Dana Anshari dalam Pemberdayaan Masyarakat Produktif Potensial di Bukittinggi*. Skripsi. Program Strata 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Padang
- Agung, N.B. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta : PT. Andi
- Ahmed, Habib. 2002. "Financing Microenterprise : An Analytical Study of Islamic Microfinance Institution". *Islamic Economic Studies*, Vol. 9, No. 2
- Akhter, Wahid. 2009. *Islamic Micro-Finance And Poverty Allevation : A Case of Pakistan*
- Alqur'an dan Hadist
- Andi, Ihsan Arkam. *Keuangan Mikro Islam*. Disampaikan pada acara Training AISMIF di Aceh Maret 2008
- Arnas, Tria Dewis. 2009. *Praktek Zakat di Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. Program Strata 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Padang
- Arsyad. 2006. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta : Andi Offset
- Arun, Thankom, Katsushi Imai and Frances Sinha. 2006. "Does Microfinance Reduce Poverty in India? Propensity Score Matching based on National-level Household Data," Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Working Paper Series, No. 17.

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar dalam
Angka 2008 : Padang

Baswir, Revrisond. 1999. *Tantangan dan Peluang Usaha Kecil dalam Era
Perdagangan Bebas*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Chambers, Robert. 1996. *PRA Partcipatory Rural Appraisal : Memahami Desa
Secara Partisipatif*. Yayasan Mitra Tani bekerjasama dengan
Kanisius. Yogyakarta

Elfindri dan Aristo Munandar, 2009. *Makmur Bersama Mesjid*. Jakarta : Baduose
Media

Haeruman, Herman. 2001. *Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*.
Jakarta : Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan Business
Inovation

Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

Hosmer, D.W., and Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression*. John
Willey, New York.

Khandker, Shahidur R. 2003. "Micro-finance and poverty: evidence using panel
data from Bangladesh," *World Bank Policy Research Working Paper
Series*, No. 2945, January 2003.

Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan
Kebijakan*. UPP AMP-YPKN, Yogyakarta

Mughni, Abdul. *Keuangan Mikro Islam Upaya dalam Pengentasan Masalah
Sosial*. Ditulis dalam halaman konsultasi muamalat, 8 Mei 2008

Nachrowi, 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Edisi Revisi. Rajagrafindo
Perkasa. Jakarta

- Nawas, S. 2010. *Microfinance and Poverty Reduction: Evidence from a Village Study in Bangladesh*. Journal of Asian and Afrikan Studies 2010 45:670. <http://jas.sagepub.com/content/45/6/670>
- Panjaitan, Rosintan D. M, "Gender, Self-Empolyment and a Micro Credit Program: An Indonesian Case Study," dalam The Quarterly Review of economics and Finance, 39 (5), 1999:94-105,
- Pinbuk. 2005. *Peraturan Dasar dan Contoh AD ART BMT*. Jakarta : Wasantara Net.id.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 2009. Bahan Bacaan
- Renggani, Woro Triwening. 1998. *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit (Studi Kasus pada BMT Ulil Albab, Bogor)*. Skripsi. Program Stara 1 Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Rose, Kalima, *Where Woman are Leaders: The SEWA Movement in India* (London: zed,1992)
- Safitri, Eza Fera. 2009. *Analisis Peran Pembiayaan Mikro BMT Terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Kecil di Kabupaten Agam*. Skripsi. Program Strata 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Padang
- Singgalang, Harian. 28 Oktober 2008. "Agam Paling Banyak BMT". www.hariansinggalang.co.id
- Sitorus, MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif : suatu Pengenalan*. Dokis. Bogor
- Statistik Perbankan Indonesia, 2007

Suman, Agus. 2006. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro dan Kemiskinan : Sebuah Studi Eempiris*

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. "*Kemiskinan Teori, Fakta dan Kebijakan*".
IMPAC: Jakarta,

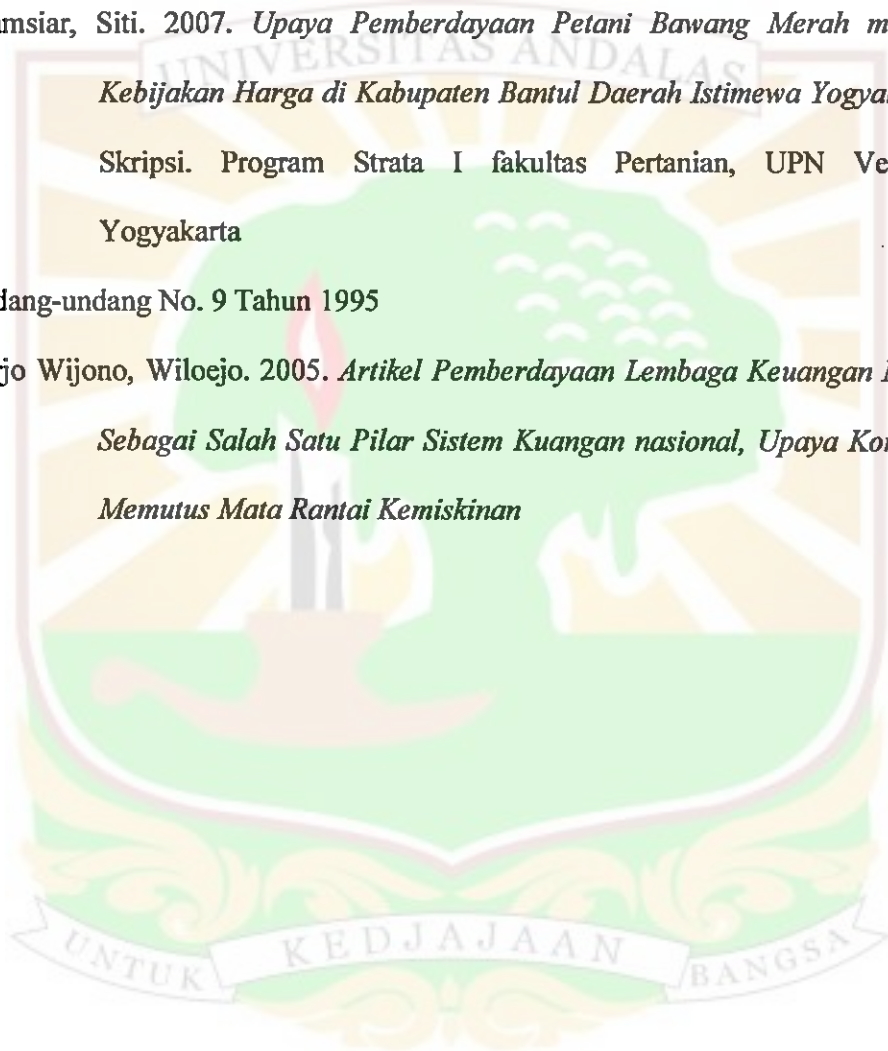
Suparlan, P. 1995. *Kemiskinan di perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Syamsiar, Siti. 2007. *Upaya Pemberdayaan Petani Bawang Merah melalui Kebijakan Harga di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Skripsi. Program Strata I fakultas Pertanian, UPN Veteran,
Yogyakarta

Undang-undang No. 9 Tahun 1995

Wirjo Wijono, Wiloejo. 2005. *Artikel Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan nasional, Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*



Kuisisioner Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rumah Tangga Miskin Akses BMT di Kabupaten Tanah Datar

Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat :

1. Terima kasih sebelumnya penulis ucapkan atas waktu dan kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini
2. Kuisisioner ini dibuat dalam rangka penelitian yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
3. Penulis berharap agar kuisisioner ini diisi sesuai dengan pendapat dan hati nurani bapak/ibu/saudara/i
4. Cara mengisi dan menjawab pertanyaan :
 - a) Isilah data/jawaban pertanyaan pada titik atau kolom yang telah tersediasecara singkat dan jelas
 - b) Pada jawaban yang telah tersedia (a, b, c, ...) lingkari satu jawaban yang dianggap benar
 - c) Pada jawaban yang telah tersedia dengan tanda bintang (*) coretlah yang tidak perlu

TERIMA KASIH

tanggal pengisian :.....

Tanggal pengisian :.....

No Kuisioner :.....

Nasabah BMT	a. BMT Al Barokah b. BMT Al Hikmah
-------------	---------------------------------------

Latar Belakang Responden

Usia	
Pendidikan Terakhir	
Jenis kelamin	Laki-laki/Perempuan*
Jenis Usaha	a. perdagangan b. Non perdagangan (.....sebutkan)
Luas Tempat Usaham ²
Lama Menjalani Usahath

Akses BMT

Tahun Memperoleh Pembiayaan	Th.....
Jenis produk pembiayaan yang diambil	a. BBA/murabahah b. Qardhul Hasan c. Mudharabah
Besarnya Pembiayaan Yang diperoleh	Rp.....
Pembiayaan yang diperoleh Digunakan Untuk apa	a. Untuk keperluan modal usaha b. Untuk kegiatan konsumtif c. Untuk keperluan usaha dan konsumtif d. Lainnya, sebutkan.....
Lama menjadi nasabah BMT
Besarnya pengembalian pembiayaan kepada pihak BMT	Rp.....
Apakah tingkat kepatuhan pengembalian pembiayaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan BMT	a. Ya b. Tidak
Bagaimana jangka waktu pengembalian yang telah disepakati dengan BMT	a. Lama b. Sedang c. cepat
Jangka waktu pengembalianbulan/tahun*
Sistem pengembalian pembiayaan	Harian/mingguan/bulanan*
Pada saat sebelum mengajukan pembiayaan/pinjaman ke BMT, bagaimana keadaan usaha	a. Meningkatkan b. Tetap c. Menurun
Apakah dalam melakukan pengembalian pembiayaan mengalami kesulitan	a. Ya b. Tidak
Apakah tindakan yang diambil pihak BMT jika terlambat dalam melakukan pembayaran	
Apakah jumlah pembiayaan yang disetujui sesuai dengan yang dibutuhkan	a. Sesuai b. Kurang sesuai c. Tidak sesuai
Setelah pembiayaan lunas apakah masih memerlukan pembiayaan dari BMT	a. Tidak akan mencari pinjaman b. Mencari pinjaman ke selain BMT c. Tetap berhubungan dengan BMT

Alasan tetap berhubungan dengan BMT	<ul style="list-style-type: none"> a. Karena BMT menggunakan sistem syariah b. Sudah familier dengan petugas BMT c. Prosedur murah dan persyaratan ringan d. Masih membutuhkan modal
Alasan Tidak akan berhubungan dengan BMT	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mau repot lagi dan menambah jumlah tanggungan/beban yang sudah ada b. Takut tidak bisa mengembalikan pembiayaan tepat waktu mengingat pendapatan terbatas
Sudah berapa kali memperoleh pembiayaan dari BMT	
Apakah saudara mengerti dengan sistem bagi hasil	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Mengerti sedikit c. tidak
Pernah memperoleh pembiayaan/pinjaman dari lembaga lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak
Jika ada dari mana pembiayaan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank b. Lembaga c. perorangan
Berap besar pembiayaan/pinjaman	Rp.....
Apa kendala yang dihadapi saat berhubungan dengan lembaga tersebut	

Kinerja usaha

Awal mulai usaha	Th.....
Berapa modal awal dalam memulai usaha	Rp.....
Produk yang dihasilkan	
Jumlah tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Dari keluargaorg b. Dari non keluargaorg
Bagaimana status tempat usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Milik sendiri b. Kontrak c. Tidak milik sendiri/tidak kontrak
Lokasi usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Langsung dari rumah b. Terpisah dari rumah
Keuntungan perhari kerja	Rp.....
Apakah keuntungan tersebut dicatat	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak
Apakah pembiayaan tersebut dapat membantu perkembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak
Bagaimana asset dan skala usaha setelah memperoleh pembiayaan dibanding sebelum memperoleh pembiayaan BMT	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan b. Tetap c. Menurun

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases(a)		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	79	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	79	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		79	100,0

a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
≤ 1 tahun	0
> 1 tahun	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History(a,b,c)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients
		Constant
Step 1	102,729	,582
0	102,723	,600
2	102,723	,600
3	102,723	,600

a Constant is included in the model.

b Initial -2 Log Likelihood: 102,723

c Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table(a,b)

Observed			Predicted		
			akses bmt		Percentage Correct
			≤ 1 tahun	> 1 tahun	≤ 1 tahun
Step 0	akses bmt ≤ 1 tahun		0	28	,0
	> 1 tahun		0	51	100,0
Overall Percentage					64,6

a Constant is included in the model.

b The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.		Wald		df	Sig.		Exp(B)	
		Lower	Upper	Lower	Upper		Lower	Upper	Lower	Upper
Step 0	Constant	,600	,235	6,499	1	,011	1,821			

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	PU	27,119	1	,000
		KP	1,000	1	,317
		RBW	9,101	1	,003
Overall Statistics			32,053	3	,000

Block 1: Method = Enter

Iteration History(a,b,c,d)

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients				
		Constant	PU	KP	RBW	Constant
Step 1	1	69,807	-,160	2,640	-,625	-1,061
	2	65,948	,546	3,514	-1,275	-1,961
	3	65,248	1,151	3,995	-1,736	-2,589
	4	65,194	1,383	4,167	-1,898	-2,832
	5	65,194	1,409	4,187	-1,915	-2,859
	6	65,194	1,409	4,187	-1,915	-2,860

- a Method: Enter
- b Constant is included in the model.
- c Initial -2 Log Likelihood: 102,723
- d Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step Block	37,529	3	,000
	Mode	37,529	3	,000
	l	37,529	3	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	65,194(a)	,378	,520

a Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	2,187	3	,535

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		akses bmt = ≤ 1 tahun		akses bmt = > 1 tahun		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	Observed
Step 1	1	13	12,566	0	,434	13
	2	1	1,434	1	,566	2
	3	13	13,441	31	30,559	44
	4	0	,183	3	2,817	3
	5	1	,376	16	16,624	17

Classification Table(a)

Observed			Predicted		
			akses bmt		Percentage Correct
			≤ 1 tahun	> 1 tahun	≤ 1 tahun
Step 1	akses bmt	≤ 1 tahun	14	14	50,0
		> 1 tahun	1	50	98,0
Overall Percentage					81,0

a The cut value is ,500



Variables in the Equation

	B	S.E.		Wald	df		Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)	
		Lower	Upper		Lower	Upper			Lower	Upper
Step 1(a) PU	4,187	1,261		11,034	1		,001	65,831	5,565	778,715
KP	-1,915	1,837		1,087	1		,297	,147	,004	5,391
RBW	2,860	1,396		4,199	1		,040	8,057	,004	,883
Constant	1,409	2,181		,417	1		,518	4,093		

a Variable(s) entered on step 1: PU, KP, RBW.



Crosstabs Akses BMT

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
akses bmt * profil usaha	79	100,0%	0	,0%	79	100,0%
akses bmt * kepatuhan pengembalian	79	100,0%	0	,0%	79	100,0%
akses bmt * reborrowing	79	100,0%	0	,0%	79	100,0%

akses bmt * profil usaha Crosstabulation

Count

		profil usaha		Total
		non perdagangan	perdagangan	non perdagangan
akses bmt	≤ 1 tahun	14	14	28
	> 1 tahun	1	50	51
Total		15	64	79

akses bmt * kepatuhan pengembalian Crosstabulation

Count

		kepatuhan pengembalian		Total
		kurang lancar	lancar	kurang lancar
akses bmt	≤ 1 tahun	1	27	28
	> 1 tahun	13	38	51
Total		14	65	79

akses bmt * reborrowing Crosstabulation

Count

		reborrowing		Total
		tidak	ya	tidak
akses bmt	≤ 1 tahun	1	27	28
	> 1 tahun	5	46	51
Total		6	73	79